



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RDP DENGAN DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Hari, Tanggal	:	Senin, 26 Januari 2015
Waktu	:	10:20:16 WIB – 15:59:08 WIB
Tempat	:	R. Rapat Komisi IX
Ketua Rapat	:	
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE./Kabag Set. Komisi IX DPR RI
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas <i>Grand Design</i> kebijakan dan program BPJS Ketenagakerjaan terkait:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perlindungan dan perluasan kepeserta peserta</li><li>b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lain dalam penyelenggaraan program jaminan social</li><li>c. Persiapan pelaksanaan program pensiun bagi peserta per 1 Juli 2015</li></ol></li><li>2. Perkembangan persiapan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Program JHT, Program JKK dan Program Jaminan Kematian serta Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pensiun</li><li>3. Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan</li><li>4. <i>Performance</i> investasi BPJS Ketenagakerjaan pada pasar modal Tahun 2014</li></ol>
Hadir	:	39 Anggota

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena (F-PPP)

**F.PDIP :**

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Ir. Ketut Sustiawan
9. Dr. Ribka Tjiptaning
10. Rieke Diah Pitaloka
11. Daniel Lumban Tobing
12. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
13. Abidin Fikri, SH
14. Dr. Karolin Margret Natasa

**F.PG :**

15. Hj. Saniatul Lativa, SE
16. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
17. Dr. Charles J. Mesang
18. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

**F.P.GERINDRA :**

19. Khaidir
20. Dr. H. Suir Syam, M.Kes
21. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
22. drg. Putih Sari
23. Roberth Rouw.

**F.PD :**

24. Drs. H. Zulfikar Achmad
25. Siti Mufattahah, Psi.
26. Drs. Ayub Khan.
27. Dr. Verna Gladies Merry Inkiwirang
28. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

**F.PAN :**

29. Ir. H. A Riski Sadig
30. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH., M.Hum

**F.PKB :**

31. Marwan Dasopang
32. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
33. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

**F.PKS :**

34. Dra. H Hamid Noor Yasin, MM

**F.PPP :**

35. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

36. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si

**F.P.NASDEM :**

37. Irma Suryani Chaniago, SE

38. Amelia Anggraini.

**F.P. HANURA :**

39. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

**ANGGOTA IZIN/SAKIT :**

1. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

2. H. Handayani, SKM

3. Ansory Siregar, Lc

4. Drs. H. Chairul Anwar, Apt

**UNDANGAN :**

1. Elvyn G. Masassya (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT :**

### **KETUA RAPAT :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat pagi,  
Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang saya hormati Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajaran,  
Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya bagi kita semua sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini.

Sebelum saya membuka Rapat Dengar Pendapat ini perlu kami beritahukan bahwa seluruh anggota yang sudah hadir itu sebanyak 17 Anggota dari 47 Anggota, dari 8 Fraksi, jadi kita sudah mulai sambil menunggu Teman-teman yang lain segera hadir dalam ruangan ini, dapat kita nyatakan sudah kuorum Fraksi, demikian Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

<b>RAPAT DIBUKA PUKUL 10:20:16 WIB</b>
--

Mengenai waktu untuk sementara kita sepakati sampai jam 1 dulu, apa bisa disepakati? Nanti kalau ada perkembangan kita akan bicarakan lagi, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Selamat datang Pak Ketua.**

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat hari ini tanggal 26 akan membahas itu antara lain adalah yang pertama, kita akan membahas tentang *grand design* dari program BPJS Ketenagakerjaan, kita akan mendengarkan tentang perlindungan dan perluasan kepesertaan, kemudian koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan program, kemudian persiapan pelaksanaan program pensiun bagi peserta per tanggal 1 Juni 2015 ini waktunya memang pendek, kemudian kita juga akan mendengarkan.

Yang kedua tentang perkembangan, persiapan, penerbitan Peraturan Pemerintah tentang program jaminan hari tua, program JKK, Program jaminan kematian serta Peraturan Pemerintah tentang Program Jaminan Pensiun.

Yang ketiga, kita juga akan mendengar tentang penjelasan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan, ini kita tahu bahwa jumlah tenaga kerja kita demikian besar dan pekerja ini memang tidak mudah untuk

dilaksanakan. Ke empat, *performance* investasi BPJS ketenagakerjaan pada pasar modal tahun 2014.

Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan paparan kepada rapat hari ini, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan paparannya, silakan. Tapi mungkin sebelum kita mulai karena sebagian kita ini adalah juga Anggota DPR baru, mungkin ada baiknya kita perkenalkan Bapak bisa memperkenalkan jajaran yang ada, agar komunikasi di antara kita bisa lebih mudah lagi, silakan.

**DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ELVYN G MASASSYA):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati seluruh Anggota Komisi IX DPR RI.**

**Selamat pagi.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama-tama, tentu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memaparkan rencana kerja kami, program-program kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Ijinkan saya memperkenalkan jajaran Direksi, kami hadir disini lengkap jajaran Direksi beserta sebagian besar senior manajemen di BPJS Ketenagakerjaan, yang paling kanan adalah Bapak Amri Yusuf Direktur Umum SDM BPJS Ketenagakerjaan, di sebelah beliau adalah Bapak Agus Supriadi Direktur Perencanaan Strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan, di sebelah kanan saya Bapak Ahmad Priyadi Direktur Pelayanan dan Pengaduan BPJS Ketenagakerjaan, sebelah kiri saya Bapak Jeffry Haryadi Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, di sebelahnya adalah Bapak Herdi Risanto Direktur Keuangan dan yang paling ujung adalah Bapak Junaedi, Direktur Kepesertaan dan hubungan antar lembaga, saya sendiri Elvyn G. Masassya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

**Pimpinan Komisi IX DPR RI, Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Kami mendapatkan undangan untuk menyampaikan 4 (empat) agenda, jika diijinkan mungkin kami akan presentasikan sekaligus, karena apa yang saya presentasikan sesungguhnya meliputi 4 agenda tersebut, kita bisa mulai mungkin ....*(tidak jelas)*...

**KETUA RAPAT:**

Gimana para Anggota setuju? Sambil jalan ya, ya

## DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN:

Baik kita akan mulai ini Ibu Pimpinan,

Boleh ke halaman 6, di depan itu kami sampaikan eksekutif summary, detailnya kita mulai dari halaman ini. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI beserta Bapak dan Ibu sekalian. Awalnya adalah tentu Undang-Undang 24 Tahun 2011 yang mengamankan transformasi Jamsostek menjadi Ketenagakerjaan dan per 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan itu sudah berdiri dengan status badan hukum publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan nirlaba menyelenggarakan 4 program, JHT itu Jaminan Hari Tua, JKK itu Jaminan Kecelakaan Kerja, lalu JKM Jaminan Kematian, ini belum mengikuti belum mengikutkan jaminan pensiun, jaminan pensiun akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2015, itu sebabnya di 1 Juli 2015 disebut sebagai beroperasi penuh karena menyelenggarakan 4 program kepesertaan juga mengalami perbedaan, kalau dulu hanya pekerja formal atau pekerja penerima upah maka setelah menjadi BPJS kami juga harus meng ....(**tidak jelas**).... pekerja bukan penerima upah, bekerja informal dan mulai 1 Juli 2015 nanti PNS TNI Polri juga akan ikut serta dalam program BPJS untuk 2 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan program kematian, yang lain yang juga sangat berbeda adalah dalam bentuk laporan keuangan kepada pemangku kepentingan kalau pada saat PT.Jamsostek sebagai BUMN konsepnya adalah konsep laporan keuangan PT.Persero maka sekarang konsepnya dipisah pengelolaan dananya, dana jaminan sosial yang milik pekerja dan dana badan karena dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian juga dengan pengawasan, pengawasan kami sesuai undang-undang adalah di Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk pengawasan program, sedang OJK mengawasi dalam aspek keuangan dan investasi, nah inilah perbedaan antara PT Jamsostek lalu BPJS mulai 1 Januari dan nanti per 1 Juli yang disebut beroperasi penuh. Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Setelah mendapatkan mandat, amanah untuk melakukan transformasi kami membuat visi baru BPJS Ketenagakerjaan, visinya adalah menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka mencapai vision ini, nah saat ini next kami memiliki 11 kantor wilayah di seluruh Indonesia, 121 kantor cabang dan 53 kantor cabang perintis, dan tahun 2015 ini kami akan menambah 150 kantor cabang perintis.

Dapat kami tambahkan sesuai dengan amanah undang-undang bahwa kami harus memiliki *outlet* di seluruh Kabupaten kota di Indonesia, nah karena keterbatasan anggaran maka outlet yang kami siapkan itu selain yang kami miliki sendiri, kami juga bekerja sama dengan perbankan, jadi saat ini ada 1102 outlet yang kami kerja sama dengan perbankan, artinya kantor cabang-kantor cabang perbankan itu menjadi desk bagi BPJS Ketenagakerjaan, ini untuk bisa mengcapture seluruh Indonesia. Nah, setelah kami menjadi BPJS, kami mengubah paradigmanya, kalau sebelumnya dikenal sebagai produk sentrik, saat ini kami sudah masuk pada istilahnya customer sentrik lalu kalau sebelumnya komposeri atau wajib, sekarang kami harapkan bisa ....(**tidak jelas**)... dibutuhkan pekerja, kalau dulu fokus *law and enforcement* sekarang kita *relationship* lebih tinggi, lalu dulu pasif sekarang aktif, dulu tradisional dan *paperbased*, sekarang sudah modern dan elektronik, nah grand design kami bisa dilihat di *slide* berikut, kami memiliki program 5 tahun depan, dimana setiap tahun ada fase-fase yang kami harus capai

di 2014 yang lalu itu kami sebut sebagai fase sustainability benefit dan *services*, 2015 ini *full program operation*, menyelenggarakan 4 program, lalu 2016 mendeliver operational excellent, 2017 mendeliver *service excellent*, 2018 insyAllah kita akan bisa mendeliver establishment kesejahteraan pekerja.

Ini sejalan dengan tujuan visi tadi, jadi setiap tahun kami memiliki tema-tema fokus untuk mencapai vision tersebut, Tahun 2018 nanti untuk aspek kepesertaan diharapkan sudah 80% menjadi peserta kami dan informalnya 5%, lalu kepuasan pelanggan 92% ini tentu nanti akan diukur melalui survey, kalau investasi, kalau semua berjalan baik diharapkan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan bisa diatas Rp.500 triliun dan *brand equity* kita 85, nah inilah langkah-langkah yang kami siapkan setiap tahun sampai menuju 2018 nanti, dalam rangka mencapai vision itu seperti tadi kami utarakan, kami mengubah paradigma dari produk sentrik menjadi customer sentrik, nah makna *customer* sentrik bisa dilihat dari slide ini, undang-undang mengatakan kami menjalankan program jaminan pensiun, jaminan hari tua, kecelakaan kerja dan kematian, tetapi dalam rangka untuk bisa memberikan kesejahteraan dasar bagi pekerja, kami juga merancang yang disebut dengan manfaat layanan tambahan berupa total benefit kalau yang di atas itu 4 program itu hanya financial benefit, kalau pensiun dapatkan uang pensiun, kalau hari tua dapatkan uang jaminan hari tua, kalau kecelakaan kerja dibayar santunannya, kalau kematian dibayar santunannya, nah, kami menggeser itu menambahkan dengan layanan tambahan berupa *housing benefit*, artinya kita akan ikut serta menyediakan rumah-rumah bagi para pekerja dan saat ini sebenarnya sudah cukup banyak kami bangun Rusunawa di berbagai daerah Rumah Susun Sewa.

Kemudian *transportation benefit* bagaimana agar pekerja bisa dapatkan transportasi dengan harga murah dan di beberapa daerah bahkan kami menyediakan bis pekerja, lalu put benefit ini bagaimana pekerja juga bisa mendapatkan akses terhadap sembako dengan harga relatif murah, kami membangun gerai-gerai di kantong-kantong pekerja, lalu *education benefit* adalah beasiswa untuk anak pekerja yang pintar, anak-anak pekerja yang memang tidak mampu, lalu *head services*, nah *head services* ini bukan berarti kami ingin seperti BPJS Kesehatan, *head services* ini adalah dalam konteks *infrastructure*, jadi kita berencana membangun klinik-klinik di kantong-kantong pekerja sehingga kalau mereka sakit bisa cepat diobati.

### **Pimpinan, Anggota Komisi IX DPR RI, Bapak dan Ibu sekalian.**

Secara lebih detail dalam kaitan dengan kepesertaan kita bisa lihat di slide ini, yang sudah kami lakukan di tahun yang lalu, kami sudah memiliki 1.104 service poin, ini yang tadi saya sebutkan bekerja sama dengan perbankan, kalau kita sudah kerja sama dengan berbagai Pemerintah Daerah melaksanakan PSP atau pelayanan satu pintu, dengan cara ini maka Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan ijin harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, kita sudah bisa memberikan ....(*tidak jelas*)....Poin *online* banking jadi perusahaan membayar langsung ke Bank, tidak ke kita lagi,

Lalu untuk kelompok peserta seperti saya utarakan dibagi menjadi PNS TNI Polri, kemudian penerima upah, kemudian pekerja bukan penerima upah. Sedangkan dari administrasi data, kami juga sudah melakukan transformasi sekarang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu nomor kartunya sudah diparalelkan dengan NIK, jadi seluruh pekerja itu nanti nomernya adalah nomer NIK,

ini adalah satu hal baru yang kami lakukan selama 2 tahun terakhir, lalu kita juga menyelenggarakan yang disebut dengan *cash less transaction*, jadi Perusahaan-perusahaan tidak lagi membayar secara tunai tetapi langsung ke rekening mereka di Bank, ini kita sebut dengan payment channel, baik melalui *virtual account* maupun payment system.

Lalu di sisi yang lain kita juga menyelenggarakan customer relationship management dimana Perusahaan-perusahaan pekerja peserta itu kami bagi kategorinya perusahaan besar, menengah dan kecil. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, selanjutnya adalah hal baru di kami hubungan antar lembaga. Dalam hubungan antar lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang 24 dan PT Nomor 55 dan 56, kami diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun dalam berbagai pihak, nah, kami sudah menyelenggarakan kerjasama-kerjasama ini khususnya dengan Pemerintahan Daerah dan juga dengan Instansi-instansi yang lain, di luar itu juga kami menyiapkan *value creation* yang tadi saya sebutkan sebagai *total benefit* atau manfaat layanan tambahan, kami juga sekarang sedang menyiapkan *smart card*, kartu pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang nanti bisa digunakan untuk belanja di tempat-tempat tertentu untuk transportasi dan lain sebagainya.

Mengenai jumlah kepesertaan sendiri Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, sampai dengan di 2014 yang lalu jumlah peserta kami sudah mencapai 16,7 juta ini alhamdulillah lebih tinggi ketimbang target yang diberikan kepada kami yaitu 15,2 juta. Lalu kerjasama-kerjasama yang sudah kami lakukan berikutnya sudah ada kelihatan disitu kami punya kerja sama dengan Kemensos, dengan Kemenakertrans, dengan Kemendagri, dengan Dirjen Pajak, dengan DJKN, dengan Dirjen Perbendaharaan Negara dan juga dengan Dirjen Kependudukan, diluar ini kami sudah kerja sama dengan 23 pemerintahan propinsi untuk menyelenggarakan program pelayanan satu pintu, itu adalah perkembangan kami di bidang kepesertaan.

Nah, sedangkan di bidang pelayanan seperti tadi kami utarakan manfaat yang diberikan bukan cuma manfaat utama, tapi juga manfaat tambahan sehingga secara total kita sebut sebagai total benefit, nah ini yang akan kami selenggarakan mulai Tahun 2015 setelah beroperasi penuh nanti di tanggal 1 Juli. Dalam konteks pelayanan berikutnya kami juga mengimplementasikan satu pendekatan baru yang kami sebut dengan *culture* pelayanan istilahnya prima, nah prima ini kami implementasikan, kami merenovasi hampir seluruh kantor cabang kami, sehingga pelayanannya bisa lebih nyaman, kemudian kami menyiapkan satu sistem sehingga pelayanan sekarang di BPJS Ketenagakerjaan, kalau klaim itu kalau jaman dulu katanya bisa 2 minggu, 3 minggu maka sekarang 30 menit insyAllah sudah bisa selesai. Kemudian juga dari sisi people dan proses, nah implementasi pelayanan yang lebih baik itu kami wujudkan dalam bentuk kami siapkan juga mobil keliling, kami siapkan juga elektronik *payment*, elektronik registrasi dan elektronik klaim, ini semua dalam rangka mempermudah pelayanan, ini bisa dilihat di slide berikut inilah hal-hal baru yang kami siapkan transformasi sekarang kami sudah punya BPJS TK Website, BPJS TK Mobile, jadi masyarakat pekerja sudah bisa cek melalui mobile baik Android maupun Apple dan lain sebagainya, kami sudah punya BPJS TK sms service, elektronik saldo, saldo ini Ibu Pimpinan, Bapak, Ibu sekalian menarik karena jaman dulu pekerja itu terima saldonya setahun sekali melalui haper, sekarang dia bisa check anytime melalui website kami dengan memasukkan nomor kartunya



langsung bisa ketahuan. Kemudian, juga elektronik registrasi, sekarang sudah bisa mendaftar melalui website, elektronik klaim sudah bisa klaim melalui website.

Lalu ada kami punya program RSTC ini adalah Rumah Sakit Rama Center, saat ini kami sudah bekerja sama dengan lebih kurang 800 rumah sakit Indonesia, sehingga yang kecelakaan kerja langsung bisa dilayani di rumah sakit-rumah sakit tersebut. Data mengenai klaim terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2014 untuk kecelakaan kerja, ini ada 105.000 kasus lebih kurang, klaimnya Rp.634 miliar, jaminan hari tua Rp.10,6 triliun, JKM 430 miliar, untuk informasi Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, ada fenomena menarik dalam JKK ini, sebagian besar kecelakaan kerja itu ternyata terjadi tidak di pabrik atau dikantor, tetapi lebih banyak di jalan raya, jadi dengan kata lain kecelakaan kerja yang banyak klaim ke kami itu kecelakaan kerja diluar pabrik, diluar kantor, dalam bentuk kecelakaan kerja karena naik sepeda motor, ini sekitar informasi kepada Bapak, Ibu Anggota Dewan.

Untuk *good governance* kami sudah memiliki *whistleblower* sistem, kami memiliki manajemen resiko, kami sudah memiliki audit internal berbasis resiko dan lain sebagainya, jadi kesiapan institusi untuk tata kelola sistemnya sudah in place, sudah lengkap semua dan kami implementasikan di seluruh kantor cabang di Indonesia, itu tadi yang saya sampaikan adalah kesiapan institusi dalam rencana operasi penuh pada 1 Juli di luar kesiapan institusi tentu harus ada kesiapan regulasi. Nah, berikut ini kami akan jelaskan tentang kesiapan regulasinya saat ini sedang dalam proses harmonisasi untuk regulasi terkait program jaminan sosial, ada satu RPP yang sedang disiapkan yang berisi RPP JHT dan JKM, nah tetapi dari draftnya dapat kami sampaikan bahwa substansi JHT dan JKM dari sisi iuran tidak berubah, JHT tetap 5,7% sedangkan JKM itu 0,3%. Yang berubah adalah manfaat tambahannya lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, itulah substansi dari program yang sedang disiapkan ini. Kemudian, di kecelakaan kerja ini juga hal baru yang kami usulkan kepada pemerintah, bahwa saat ini para pekerja yang mengalami kecelakaan itu sesuai dengan peraturan hanya di .....(*tidak jelas*).... Kemudian di rehabilitasi, kemudian dikasih alat kalau dia mengalami cacat.

Nah ke depan kami mengembangkan ini untuk bisa kembali bekerja, kita sebut dengan *return to work*, untuk informasi Bapak dan Ibu sekalian, sepengetahuan kami saat ini di Indonesia masih sangat sedikit Perusahaan-perusahaan yang mau menerima disability untuk bisa bekerja. Nah, kami menggagas satu program kecelakaan kerja ini kalau mengalami kecelakaan sebaiknya diincludekan kembali agar bisa bekerja, jadi kami latih dan kemudian bisa bekerja kembali, ini substansi dari return to work atau kecelakaan bekerja, yang juga sekarang masih dalam pembahasan adalah aspek Peraturan Pemerintah terkait jaminan pensiun, disini ada dua isu besar yang masih belum putus yaitu mengenai iuran dan manfaat ada melibatkan para pengusaha dari Apindo, ada melibatkan serikat pekerja tetapi kesepakatan sementara untuk iuran ini adalah 8% 5% dibayar pemberi kerja, 3% dibayar pekerja, namun ini masih dalam fase pembahasan.

Nah, berikutnya adalah penjelasan kami lebih lanjut tentang total benefit, seperti tadi kami utarakan kita akan memberikan manfaat-manfaat layanan tambahan tadi melalui penggunaan kartu, misalnya kita bangun gerai atau mart jadi pekerja menggunakan kartu ini bisa mendapatkan diskon atau harga lebih murah, lalu kita bangun klinik-klinik kemudian kita bisa akses untuk transportasi, kalau mereka naik bis ongkos bisa lebih murah, naik kereta api bisa lebih murah dan yang terakhir adalah pembangunan rumah untuk pekerja, inilah yang sedang kami laksanakan sekarang dalam proses dan akan selesai di tahun 2015 ini. Berikutnya, ini contoh yang sudah kami lakukan untuk komunitas pekerja, kami baru

membangun 1500 rumah pekerja di daerah Banten dengan harga sesuai FLTP 100 105 juta untuk full furnished, nah kita akan membangun lagi hal-hal yang seperti ini tergantung di daerah-daerah lain, kalau ditanya apa masalahnya dalam hal ini, hanya satu Bu, soal lahan karena lahan itu menjadi agak susah kita dapatkan. Kemudian, kita bangun gerai BPJS ini untuk bisa dapatkan sembako dengan harga murah, kemudian Klinik dan kemudian bis pekerja kami baru memberikaan 20 bis pekerja di Batam. Terakhir adalah selanjutnya soal komunikasi BPJS dan kerjaan kami menyiapkan branding baru, beda dengan Jamsostek dulu brandingnya adalah jembatan menuju kesehatan pekerja, lalu strategi-strateginya berikutnya nah strateginya itu kita akan lakukan berbagai cara baik melalui ....**(tidak jelas)**...Maupun bilo deline,

Mungkin yang menarik untuk Bapak/Ibu ketahui adalah yang dibawah tanggung jawab sosial kami berbeda dengan Perusahaan-perusahaan secara umum, kami fokuskan kepada bagaimana memberikan manfaat kepada pekerja, jadi situ ada program perluasan sahabat BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana agar pekerja-pekerja informal juga bisa dapat kesempatan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami baru saja melaksanakan kampanye tanya saya, kami memberikan santunan kepada loper koran di Indonesia kami iurannya untuk mereka bisa dilalui oleh BPJS Ketenagakerjaan, inilah konsep-konsep baru kami dalam komunikasi dan sosialisasi mengenai investasi, Bapak, Ibu sekalian yang terhormat berikutnya kami sudah lama membuat perubahan paradigma ini dari financial benefit menjadi total benefit, jadi investasi kita itu memiliki paradigma mendukung pertemuan kepesertaan, meningkatkan pelayanan dan memberikan total benefit ke peserta, jadi kalau bahasa investasinya *investment non only investment* tetapi tapi juga bisa memperluas kepesertaan dan pelayanan, inilah konsep besar dalam pengelolaan investasi.

Lalu misalnya di situ bisa kelihatan ada resi vokal dengan perbankan seperti tadi kami utarakan kami bekerjasama dengan banyak Bank bahwa kantor cabang mereka juga menjadi kantor cabang kami, ini disebut dengan resi prokal dengan pihak perbankan, nah mengenai hasilnya sendiri bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir sejak Tahun 2008 Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, di Tahun 2008 dan kelolaan kami masih Rp.61,7 triliun, lalu di tahun 2014 yang lalu sudah meningkat 3 kali lipat ....**(tidak jelas)**... Menjadi 187 triliun dalam kurun waktu 5 tahun, lalu hasil investasinya juga bisa dilihat disitu dari Tahun 2008 Rp.7,2 triliun di 2014 sudah mencapai Rp.23,2 triliun tetapi angka Rp.23,2 triliun ini termasuk ....**(tidak jelas)**... karena ketentuan mengatakan kalau pun di ....**(tidak jelas)**... harus kami sampaikan kepada pemangku kepentingan, Jadi dari sisi jumlah dana, dari hasil investasi alhamdulillah on the right track sebagaimana harapan dari berbagai pihak.

Berikutnya, ini adalah detail kemana saja dana dan hasil investasi itu ditempatkan untuk Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat kami menyelenggarakan investasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 bahwa disitu disebutkan apa saja investasi yang boleh dan apa yang tidak boleh, kami hanya menempatkan dana investasi itu ke pasar modal di saham obligasi Reksadana, di pasar uang itu deposito di perbankan lalu penyertaan dan di properti, hanya 5 ini saja yang dibolehkan oleh peraturan tersebut dan itulah yang kami laksanakan, detailnya disana bisa dilihat perkembangannya ke masing-masing untuk tambahan informasi sejak Tahun 2014 yang lalu seluruh dana investasi ini dikelola per program, jadi tidak lagi dibanding, tetapi bisa ketahuan bagaimana dana per program baik itu JHT, JKK dan JKM sehingga bisa kelihatan *performance* masing-masing.

Hal yang lain yang juga mungkin dapat kami tambahkan adalah bahwa sejak menjadi BPJS Ketenagakerjaan kami menjadi institusi yang nirlaba, hasil investasi ini sepenuhnya adalah hak pekerja, sedangkan biaya operasional kami ditentukan oleh Kementerian Keuangan jadi kewenangan menentukan biaya operasional tidak di kami tetapi di Kementerian Keuangan. Dengan kata lain kami murni menjadi penyelenggara mengelola investasi hasilnya untuk pekerja tidak untuk institusi, sedangkan operasional kami biayanya ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Saya kira itu penjelasan singkat kami Ibu, Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

**Pimpinan, Anggota yang saya hormati, Bapak Direktur.**

Jadi, memang sudah beberapa penanya yang sudah mendaftar untuk melakukan pendalaman terhadap penjelasan yang disampaikan, kita akan mulai dari sisi kanan, ini kepada Ibu Okky dipersilakan.

**F-PPP (DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Direktur untuk paparannya dan kalau saya ya melihat paparan tadi dan mendengar saya berharap banyak bahwa nantinya BPJSTK, dulu Bapak pernah mengatakan BPJSTK.

**KETUA RAPAT:**

Maaf Bu Okky, mungkin bisa dijelaskan darimana, memperkenalkan diri.

**F-PPP (DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):**

Oh maaf. Nama saya Okky Asokawati, Nomer anggota saya A-513, saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan dapil DKI 2 meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

Jadi, saya berharap banyak Pak Direktur untuk keberhasilan dari program-program Bapak ini, nah terkait dengan keberhasilan itu saya melihat mengenai

operasional untuk BPJS TK ini, sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013 dikatakan bahwa operasional BPJS TK itu bersumber atau mempunyai keuangannya dari AUM *Aset Under Management* dimana maksimal itu 2% dari AUM presentasinya dan dari iuran JKK dan JKM 10%,

Pertanyaan saya dengan program yang sangat bagus, seperti misalnya tadi ada *job replacement* tadi ya, dengan tambahan-tambahan itu dan saya mendapatkan informasi ketika saya Reses kemarin di Dapil saya bahwa di Tahun 2014 kemarin dari AUM BPJS TK itu baru mendapatkan 1,35% . Pertanyaan saya apakah cukup operasional BPJS begitu ini yang sesuai PP harusnya 2%, tetapi Tahun 2014 itu 1,35% supaya kinerja dari BPJS TK ini memang maksimal begitu dan kalau toh memang ada kendalanya, saya ingin tahu apa kendalanya, karena sesuai dengan Undang-Undang BPJS disitu dikatakan bahwa pengurus BPJS TK yang tadinya dari Jamsostek itu tidak akan mengalami pengurangan terkait dengan asas manfaat yang selama ini mereka telah dapatkan, itu saya ingin dapatkan karena semuanya tentu adalah kembali kepada kinerja dan kebaikan dari para pekerja nantinya.

Kemudian, BPJS TK ini kan tadinya Jamsostek yang mana merupakan bisa dikatakan berorientasi pada profit begitu ya, sementara sekarang dengan badan hukum publik tentu orientasinya lebih kepada pelayanan publik yang profesional, pertanyaan saya bagaimana Bapak menyiapkan SDM Bapak begitu secara internal karena bagaimana pun juga pasti akan ada perubahan di dalam corporate culture itu sendiri. Kemudian, yang kedua, terkait dengan RPP yang saat ini masih dalam pembahasan, Pak Evlyn, kalau menurut Undang-Undang BPJS itu kan harusnya 2 tahun sejak Undang-Undang BPJS dioperasionalkan atau **diketok** maka harusnya November 2013 sudah ada begitu ya, ketika kami kemarin Rapat dengan Kemenaker kami juga sudah mengimbuai hal ini segera akan di dibuat PP tersebut karena 1 Juli itu sudah sebentar lagi, nah yang saya ingin tanya ini mengenai skema program antara manfaat pasti dengan iuran pasti, sementara BPJS tenaga kerja itu mengatakan Undang-Undang nya yang benar adalah manfaat pasti.

Nah yang ingin saya mendapat penjelasan apa bedanya antara manfaat pasti dengan iuran pasti itu tadi, dan yang ketiga, saya tertarik dengan smart card yang tadi Bapak jelaskan, multiple purse kartu begitu ya dan saya juga punya informasi bahwa Bapak juga sudah meminta ijin dari Bank Indonesia agar kartu itu bisa dipakai sebagai multiple purse, pertanyaan saya bagaimana kemudian smart card dari BPJS ini yang sudah berlandaskan NIK itu implementasi integrasinya dengan kartu-kartu Jokowi yang lain begitu, seperti misalnya KIS, KIP seperti itu saya ingin tahu bagaimana kemudian integrasinya. Dan yang terakhir mengenai total benefit, ada house, ada housing, ada food, ada beasiswa, ada *health*, pertanyaan saya apakah BPJS tenaga kerja akan membuat perusahaan lagi? membuat klinik tadi Bapak bilang, *housing*, saya ingin tahu penjelasannya mengenai hal itu.

Itu saja Pimpinan. Terima kasih. lebih kurang mohon maaf lahir batin.

*Wabilahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, ke kiri Pak Djoni silakan.

**F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Saudara Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya serta hadirin sekalian.**

Saya Djoni Rolindrawan, dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, dapil Jabar 3 meliputi kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, saya mengikuti perjalanan BPJS dari Jamsostek sebelum ditransformasi sekitar mungkin 5 tahun sewaktu saya menjadi salah satu Dewan dan kemudian Wakil Ketua Ara Pak, jadi memang saya juga salah satu yang membantah kalau tata kelola Jamsostek itu buruk, jadi baik sekali begitu bahkan beberapa kali menjadi juara di Nuriport Award yang diselenggarakan oleh 9 Institusi Bank Indonesia, ada OJK, Dirjen Pajak kemudian Meneg BUMN dan lain sebagainya begitu.

Jadi, memang apalagi terus ditambah direksi yang sekarang Pak Dirut ini menjadi direktur investasi, karena memang latar belakangnya itu pasar keuangan, jadi memang hasil dari pengembangan investasi Jamsostek itu sangat kompetitif, kemudian ditransformasi kepada Jamsostek saya juga pernah ikut dalam membahas RPP di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga dari World Bank ada beberapa yang ikut, hanya saja memang yang saya sayangkan itu seharusnya Dewan JSN yang harus merumuskan kebijakan, kemudian juga mengkaji, meneliti, itu sampai juga membuat kebijakan investasi itu entah kenapa begitu, jadi malahan didahului oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sebelumnya Jamsostek dulu, jadi Jamsostek membuat RPP bahkan waktu dibahas itu kok RPP datangnya dari Jamsostek, dalam tanda petik itu operator jadi bukan regulator, jadi itu yang saya sayangkan mungkin saya minta pada Pimpinan nanti untuk mengundang DJSN untuk mendesak supaya segera meminta Pemerintah untuk menyiapkan aturan turunan daripada Undang-Undang 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang 21 Tahun 2011, padahal kalau misalnya saja operator membuat rancangan ini juga bagaimana pun tentu berpihak kepada operator itu sendiri kurang pas begitu ya, itu juga terlihat dalam penentuan besaran iuran, besaran iuran itu sekarang bicara di 8% yaitu 3 plus 5 pekerja 3%, pemberi kerja 5%, padahal dulu sebelumnya itu kalau tidak salah 15 Pak Evelyn ya betul? jadi kelihatannya BPJS kejar target, supaya Aset Under Management atau AUM itu cepat besar, memang saya setuju bagaimana cara memperbanyak segera peserta supaya *Asset Under Management* itu besar sehingga aset besar ini juga salah satunya untuk pembangunan nasional begitu ya, karena dilempar ke pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasarmodal.

Tadi sudah disampaikan draft dari PP ini dan Perpres mungkin mudah-mudahan bisa segera karena 1 Juli itu tidak lama lagi, saya kira memang kita masih mendesak DJSN, kemudian mendesak Kementerian Teknis yang menyiapkan PP ini, karena memang penentuan besarnya iuran tadi Saudara Dirut menyatakan memang betul krusial sekali, karena apabila menentukan besaran iuran salah itu akan menyangkut juga kepada fiskal kita gitu, kepada APBN, tadi disebutkan ada iuran pasti, ada manfaat pasti.

Nah ini permasalahan di BPJS kita itu iuarannya iuran pasti tetapi kok manfaatnya manfaat pasti, padahal kalau ada resiko kegagalan investasi padahal manfaatnya itu ditentukan akan mengakibatkan ada iuran tambahan yang harus diberikan Pemerintah dari APBN, jadi itu yang sebetulnya ada resiko walaupun BPJS ambil amannya atau sudah di perhitungkan 15 tahun baru ada pembayaran

manfaat pensiun, jadi sebelumnya hanya pengembalian iuran plus hasil pengembangan seperti itu Pak ya.

Nah, mudah-mudahan segera bisa, saya kira supaya jangan seperti kesehatan semuanya semua serba dadakan yang menghasilkan sesuatu yang tidak optimal. Kemudian juga, kita belajar dari Jamsostek dulu, tenaga kerja kita kan yang sekarang itu 70 juta kali ya, 70 juta sementara peserta Jamsostek itu hanya 14 juta Pak ya, jadi presentasinya terhadap angkatan kerja itu juga masih rendah mungkin belajar dari tadi, tadi disebutkan nanti memang akan menggunakan identitas tunggal kali ya NIK itu saya kira baik sekali memang BPJS Kesehatan itu juga menggunakan identitas tunggal, saya kira memang harus terutama juga untuk melacak seperti seolah-olah dana tak bertuan yang sekarang Rp.1,4 triliun begitu ya, sebetulnya kan itu kan dana yang namanya ada itu, namanya ada tapi tidak bisa diacak berada dimana mereka itu, nah mungkin dengan NIK nanti itu kemana pun yang bersangkutan akan bisa terlacak saya kira program, ini juga terjadi di beberapa dana pensiun, jadi ada beberapa peserta yang sudah tidak bisa diacak padahal manfaatnya itu masih ada di dana pensiun, itu saya kira Pimpinan.

Mohon disinergikan dengan BPJS Kesehatan yang mereka juga sudah memulai dan juga Dewan SJSN kita telah undang bersama mungkin suatu saat nanti. Kemudian, segera itu, yang lainnya sudah dimintakan tadi oleh rekan saya Ibu Okky, kemudian juga mungkin tidak langsung berhubungan dengan BPJS, mengenai usia pensiun, usia pensiun itu sekarang kan kebanyakan korporasi itu 54, 55 tahun ini kecuali di bidang pendidikan itu juga ada yang sampai 60, 60 lebih malahan begitu ya. Jadi mungkin untuk meningkatkan manfaat pensiun nanti, mungkin bila ada kesempatan nanti Pimpinan agar usia pensiun normal itu kita usulkan untuk dinaikkan supaya masa pensiun daripada pekerja-pekerja itu relatif pendek daripada dibandingkan dengan harapan hidupnya, jadi manfaat yang diterima itu akan besar, walaupun ini kan ada versus jumlah pengangguran yang ada memang itu juga tidak bisa kita nafikan begitu ya.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mohon juga Pak Dirut saya dengar ini ada sekarang rebutan rebutan peserta begitu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Taspen itu ya itu yang mungkin, coba tolong bicaralah supaya apa namanya ada Friksi-friksi karena friksi di tempat lain juga sudah ada, mudah-mudahan Komisi IX DPR RI juga bisa nanti menengahi mungkin supaya tidak rebutan peserta, terutama di pegawai Pemda, pegawai pemda masuk ke Taspen atau pegawai pemda masuk ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, kanan. Ini kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka silakan.

#### **F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita,  
Om Swastiastu,  
Shallom.**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajarannya.**

Terima kasih untuk presentasinya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti telah diulas oleh beberapa rekan tadi, pertama adalah menyangkut persoalan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah transformasi dari PT.Jamsostek, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang BPJS bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek sampai dengan berubahnya Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi pertama, adalah untuk menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan, terkait hal tersebut saya ingin mempertanyakan dana yang non JHT itu seperti GPK itu dalam laporan keuangan Jamsostek 31 Desember 2013, berjumlah Rp.2,5 triliun lalu kemudian diserahkan ke BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp.500 miliar, nah saya mohon klarifikasi untuk data ini dan juga tentu saja kami minta laporan pengalihan aset dari dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu kemudian, mengenai pengalihan pegawai itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi catatan kami dan sudah menjadi keputusan DPR RI meskipun DPR RI periode kemarin tapi itu adalah keputusan politik DPR RI sebagai lembaga politik resmi negara, kami mohon data berapa orang yang tenaga kerja outsourcing yang seharusnya memang menjadi karyawan di BPJS Ketenagakerjaan namun kemudian akhirnya tidak dilanjutkan ke kerjanya dan saya tetap mengingatkan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat *core* bisnis itu tidak bisa statusnya outsourcing atau kontrak dan menurut logika kami tentu saja seperti juga BPJS Kesehatan yang tadinya hanya pesertanya itu skupnya hanya sedikit, sekarang kan seluruh Indonesia artinya membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi, begitu juga dengan Jamsostek, jadi seharusnya kan memang tidak ada pengurangan tenaga kerja dari Jamsostek yang sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan, nah kami mohon laporan terakhir mengenai ketenagakerjaan yang ada di Jamsostek.

Lalu kemudian, tadi sudah disinggung mengenai dana JHT yang tidak diketahui pesertanya, ini juga menjadi pembahasan kita selama 5 tahun kemarin awalnya dananya Rp.1,8 triliun tetapi terus menurun dan ini juga ada di BPJS Ketenagakerjaan, kami minta laporan mengenai JHT JHT tersebut kira-kira digunakan apa saja, kenapa terus turun dan apakah memang dibagikan kepada peserta sudah ketemu itu yang tuannya itu ya karena dulu katanya tidak ada tuannya, apakah sudah ketemu, berapa yang sudah ketemu dan sisanya dikemanakan sehingga asetnya itu berkurang. Kemudian juga, saya mohon data secara detail terkait BPJS Ketenagakerjaan, mudah-mudahan ini jadi kesimpulan rapat berapa jumlah peserta program jaminan kecelakaan kerja, jumlah program jaminan hari tua, jumlah peserta jaminan kematian dan jumlah pegawai dan kantor BPJS Ketenagakerjaan dan penyebarannya di seluruh Indonesia.

Lalu kemudian, berapa akumulasi dana jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Kemudian yang jaminan pensiun saya kira, eh mengenai kantor BPJS Ketenagakerjaan sebelum kita beroperasi secara lebih dalam sesuai perintah Undang-Undang tanggal eh bulan Juli 2015 maka kami menyarankan untuk

Daerah-daerah yang memang kawasan industri jangan terjadi seperti apa yang pada BPJS Kesehatan kantornya itu cuman satu, jelas itu tidak mungkin, oleh karena itu mohon disesuaikan dengan peta industri yang ada agar jumlah kantor pelayanan itu misalnya contoh daerah pemilihan saya Kabupaten Bekasi itu ada mungkin 4 kawasan industri besar karena dia kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, maka saya berharap kantor pelayanan itu tidak hanya satu tapi dibagi berapa zona, tergantung jumlah industri dan jumlah pekerja di setiap di setiap daerah.

Kemudian, mengenai Rumah Sakit KBN Cakung yang diresmikan 1 Mei 2014 kabarnya sampai sekarang belum dioperasikan, ini mohon juga penjelasan kenapa belum dioperasikan, lalu mengenai investasi dulu yang pernah kita permasalahan dari Jamsostek investasi ke PT.Garuda ini apa kabarnya. Apakah kan turun terus katanya di Garuda lalu kemudian mengenai pinjaman dana Jamsostek ke PLN sebesar Rp.400 miliar, ini juga mohon klarifikasinya dari PT Jamsostek.

Kemudian, mengenai program di TV saya sering sekali melihat Bapak muncul di televisi itu ya, di salah satu TV Swasta mungkin juga perlu dijelaskan kepada kami berapa dana advertising dari BPJS Ketenagakerjaan ini dan digunakan untuk program apa saja itu karena kita juga harus melihat bagaimana indikator suksesnya, karena kami tahu untuk acara blocking time di Televisi itu tidak murah begitu, lalu apakah kemudian ini membuat para pekerja jadi lebih paham terhadap program ini atau tidak.

Yang terakhir adalah mengenai upah atau gaji Direksi dari BPJS Ketenagakerjaan kami mohon keterangannya seperti juga DPR RI yang per bulannya terbuka kepada publik, maka kami juga mohon data berapa gaji dari Dirut BPJS hingga jajaran lainnya sehingga ada transparansi disini.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik tema kasih.

Selanjutnya, sebelah kiri kepada Bapak Ketut Sustiawan, silakan.

#### **F-PDIP [IR. KETUT SUSTIAWAN):**

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.

**Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Saya Ketut Sustiawan dari Fraksi PDI Perjuangan A-150. Dapil kota Bandung kota Cimahi, Jabar I. Pak Dirut dan jajaran, BPJS Ketenagakerjaan. 1 Juli 2015 saya kira bukan waktu yang lama lagi, sehingga kita perlu mempersiapkan dengan baik sebelum operasional ini berjalan total jadi ada beberapa hal yang tentu memerlukan juga persiapan-persiapan walaupun ini sudah berjalan juga paling tidak 6 hal yang



perlu segera mendapat penyalarsan, yaitu antara lain dari aspek regulasi, kemudian aspek kelembagaan, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan dan pengawasan. Saya kira 6 aspek ini perlu kita sinkronkan segera sehingga ketika 1 Juli 2015 dan seterusnya, persoalan yang kita hadapi persiapan-persiapan ini sudah demikian terukur, yang pertama tentu persoalan aset dan pengelolaan aset ini menjadi penting, kita tidak berharap bahwa ini akan menjadi suatu persoalan ke depan dan juga harapannya tidak terjadi *conflict of interest* dalam pengelolaan aset BPJS ini, kenapa? Kita tahu bahwa transformasi dari Jamsostek ke BPJS ini kalau kita lihat data Tahun 2013 total aset PT.Jamsostek itu sekitar Rp.153 triliun dan kemudian investasinya mencapai hampir Rp.150 triliun dari hasil perolehan investasi ini pada tahun itu kira-kira sekitar Rp.15 triliun, tadi juga disampaikan bahwa ada lima hal apa dalam investasi ada lima sektor yang dialokasikan, sehingga apa yang di sampaikan oleh Teman-teman tadi kita juga ingin mendapat lebih detail tadi disebutkan beberapa nama perusahaan dimana dimana dana PT.Jamsostek ini diinvestasikan, saya kira kita perlu mendengar ini lebih jelas dan termasuk didalamnya dalam aspek kelembagaan bahwa betul kita harus ada transparansi di dalam manajemen keuangan ini terutama adanya *conflict of interest* antara badan pengawas atau komisaris dengan direksi, jadi kalau kita melihat atau apa gaji atau dana yang di peroleh oleh komisaris ini juga berasal dari badan, jadi kita khawatir bahwa ini juga akan menimbulkan *conflict of interest* di antara badan pengawas ini, jadi ini perlu segera barangkali diberikan penyalarsan sehingga hal-hal ini, kekhawatiran ini juga disamping adanya *conflict interest* ini juga kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari.

Jadi, saya kira ini perlu kita antisipasi. Nah berikutnya, soal bagaimana kita meningkatkan kepesertaan, tadi sudah dipaparkan target Tahun 2018 itu 80% pekerja formal, 5% informal barangkali perlu tahapan sejak Tahun 2015 ini target-targetan kepesertaan ini dan bagaimana kemudian kita menyamakan pada pemberi kerja, jadi kalau dalam undang-undang ini masih ada hal yang belum adil, ada ketidakadilan antara pemberi kerja yang tidak melakukan kewajibannya membayar iuran dengan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaannya di BPJS ini, saya kira soal sanksi di dalam Undang-Undang BPJS ini juga perlu menjadi perhatian kita, jadi yang lebih berat justru adalah pemberi kerja yang menunggak iuran dibandingkan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan peserta BPJSnya, jadi yang tidak mendarat ini hanya administrasi sanksinya, kemudian kalau yang menunggak iuran justru mendapat sanksi lebih berat, jadi saya kira ini perlu ada perhatian kita.

Jadi itu barangkali hal-hal yang penting selain nanti mungkin bisa dijelaskan dari aspek regulasi adakah Peraturan Pemerintah mungkin yang masih memerlukan pembahasan dan berapa saya kira mungkin kalau tidak salah ada 7 (tujuh) PP yang harus juga segera dirampungkan ini, mohon ini progres dari menyusul penyusunan RPP ini yang bisa disampaikan pada Komisi IX DPR RI pagi hari ini. Saya itu Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, Ibu Verna silakan.

**F-PD (dr.VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya Verna Inkiriwang A-499 dari Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah. Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta seluruh jajarannya yang saya hormati serta Rekan-rekan Komisi IX DPR RI yang saya hormati. Hanya 3 (tiga) saja pertanyaan singkat saya. Pertama, tadi juga sudah disinggung oleh beberapa rekanan terdahulu, kami mohon penjelasannya lebih detail Pak Dirut bagaimana finalisasi tentang masalah regulasi pengalihan aset dan liabilitas kemudian masalah pegawai tentang hak serta kewajiban PT.Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan, mengingat ada catatan kami tadi juga sudah disinggung oleh rekan terdahulu masih ada rekening tak bertuan ya Rp.1,4 triliun ini yang sampai saat ini belum diklaim oleh pemiliknya begitu ya, kami mohon penjelasannya lebih detail. Kemudian yang kedua, tentang kepesertaan mengingat waktu yang efektif tinggal 5 bulan lagi ke 1 Juli 2015 bagaimana metode atau pendekatan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terkait hal ini, apakah masih menggunakan pendekatan yang persuasif atau pendekatan yang sudah lebih agresif misalnya dengan law enforcement, kami mohon penjelasannya.

Kemudian yang terakhir, tentang jaminan pensiun yang selama ini dikelola oleh pihak swasta maupun oleh pihak dana pensiun BUMN, apakah ke depannya BPJS Ketenagakerjaan akan mengambil alih langsung pengelolaannya ataukah pengelolaannya diberikan kepada mereka begitu ya atau akan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru. Kami mohon penjelasannya. Mungkin itu saja tiga pertanyaan dari saya Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Daniel Tobing silakan.

**F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi IX DPR RI serta Pak Dirut dan Direktu BPJS Ketenagakerjaan.**

Nama saya Daniel Tobing, dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Barat 7 Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, makanya seberang-seberangan biar bisa main mata. Pertama, saya di Komisi VI DPR RI itu dari Oktober awal Juni 2010 sampai 31 September 2014, sekalipun belum pernah rapat dengan Jamsostek, saya juga tidak mengerti kenapa waktu saya di Komisi VI DPR RI itu Jamsostek susah banget datang ke Komisi VI DPR RI, itu yang pertama.

Nah, saya pindah ke Komisi IX DPR RI bukan karena Jamsostek sih nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, cuman kalau saya tidak bisa bertanya kalau tidak ada data Pak, sayang sekarang yang diberikan kepada kami ini datany sangat minimal sekali, oleh karena itu, kalau kita bicarakan perubahan per

tanggal 1 Januari ini ini kita sebelum saya komentar seperti orang buta jug apa yang mau dikomentari kalau cuman mau lihat seperti begini saja, karena kalau presentasi seperti ini, ini terlalu baik, saya paling curiga kalau presentasi terlalu baik pasti ada yang diumpetin, itulah sudah umumlah. Oleh karena itu, yang pertama, saya minta laporan keuangan yang audited dari Tahun 2008 sampai 2013, ini kan sudah ada *audited ....(tidak jelas)...* Jadi 5 tahun terakhir ini laporan keuangan pada saat itu namanya Jamsostek

Yang audited dari Tahun 2008 sampai 2013.

Yang kedua, ini sudah tutup buku saya pikir Januari- Desember ini laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014, jadi disitu nanti teman saya Rieke menanyakan detailnya disitu ntar kita lihat nih pergerakan dananya itu kemana, nah, yang keempat saya juga ingin melihat struktur organisasi PT.Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan itu bedanya dimana, itu dibikin komplit saja Pak, dibandingkan Dirutnya kalau dahulu namanya BOD walaupun namanya berubah di bawahnya itu berapa Kanwil, berapa ini sehingga termasuk jumlah tenaga kerjanya dan *outsourching*nya, pada saat namanya Jamsostek pegawai *outsourching* berapa sekarang Tahun 2014 sekarang ini di dalam struktur itu kita bisa melihat dimana saja dia ada nih, masih ada tidak yang namanya disebut *outsourching*, jadi disini kita karena masih baru 5 tahun, biar kita bisa *follow* selama 5 tahun. Jangan dibilang grand design 5 tahun, yang golnya itu kalau golnya itu kita sepakati *clear* ini yang kita jalankan mulai dari struktur organisasinya, dari laporan keuangannya, kemudian juga nanti kita sama-sama jangan tiba-tiba seperti di Komisi VI DPR RI sekalipun tidak bisa ketemu begitu loh, cukuplah yang 5 tahun yang lalu itu, sekarang kita sama-sama *clear*, kita sama-sama mengawasi supaya ini BPJS Ketenagakerjaan ini berguna bagi masyarakat khususnya ketenagakerjaan.

Kemudian, apa namanya yang ketigalah, mengenai investasi nah ini juga saya berharap data investasinya tidak seperti terlalu ini, kalau seperti begini saja saya juga bingung bacanya ini, cuman hanya global saja ya, ini BPJS Ketenagakerjaan pada saat ini mengolah sekitar Rp.187 triliun, ya ini bukan uang Bapak-bapak yang di depan, ini uang rakyat. Jadi, saya minta beri data *seclear-clear*nya misalnya depositonya ini Tahun 2014 Rp.53,8 triliun ini taruh di Bank mana saja, besarnya berapa, surat utangnya Rp.79,5 triliun itu surat utangnya itu surat utang siapa? mungkin SUN atau pun surat utang apakah juga ada perusahaan lain sahamnya yang Rp.37,7 triliun ini saham apa? apakah saham go publik atau saham perusahaan yang non IPO? Ya kan? Nah, Reksdana Rp.14,7 triliun Reksdana yang seperti apa? Ini data ini saya minta sedetail-detailnya diberikan ke Komisi IX DPR RI supaya kita bisa komentari kalau tidak bisa dikomentari apa mau diomongin? Begitu loh. Ya? Nah ini, perubahan dari 2013-2014 Rp.40 triliun atau pun ini kita komperasi, perbandingan karena ini di halaman 38 saya tidak mengerti ini, ini kalau dikatakan 2014 dana tumbuh 20,28 rata-rata per tahun terus hasil tumbuh 21%, nah nomer 3 hasil investasi Tahun 2014 termasuk *underilled gain* sebesar Rp.5,16 triliun tapi di tabel itu Rp.23,2 triliun tadi dikatakan Pak Dirut ini *underilled*, ini kenapa beda angkanya?

Saya tidak paham ini, nanti tolong dijelaskan. Ini kalau dikatakan hasil investasi Tahun 2014 *underilled gain*nya ini sebesar Rp.5,16 triliun, tapi di tabel Rp.23,2 triliun. Jadi, ini kayak begini saya tidak paham ini, jadi sekali lagi saya harap Teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan ini data-data ini penting untuk awal di Komisi IX DPR RI supaya kita bisa *memfollow* mungkin nanti kita setiap triwulan, ya kan? karena ini kan kalau kita bicarakan kepesertaan itu kita juga ingin tiap-tiap bulan

bertanya benar tidak bertambah? apa masalahnya? jangan tiba-tiba tiap 1 tahun sekali, saya sih mengharapkan demikian.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Daniel.

Selanjutnya, ke Pak Hamid. silakan Pak Hamid.

#### **F-PKS (DRS. H. HAMID NOOR YASIN, MM):**

Terima kasih.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Direktur BPJS Ketenagakerjaan beserta segenap  
jajarannya,  
Hadirin sekalian yang saya hormati pula.**

Perkenalkan nama saya Hamid Noor Yasin, dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV, Wonogiri, Sragen, Karang Anyar, dari Fraksi PKS. Pertama, saya perlu mengapresiasi misi yang diemban oleh BPJS Ketenagakerjaan yakni jembatan menuju kesejahteraan pekerja, tentu ini terkandung amanah yang sangat berat sekali Bapak-bapak, Ibu sekalian, sehingga ini membutuhkan kesungguhan dalam melaksanakan program-program kerja sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak dan juga cita-cita kita semuanya untuk mensejahterakan para pekerja ini bisa terwujud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering kita diskusikan di Komisi IX DPR RI ini bahwa di DPR RI ini ada komisi mata air, dan ada komisi air mata Pak, Komisi IX DPR RI ini termasuk komisi airmata artinya setiap persoalan-persoalan yang mendera kawan-kawan kita tenaga kerja, baik itu kawan-kawan buruh yang sudah sering datang kemari mengadukan berkaitan dengan persoalan-persoalan upah, juga persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah BPJS Tenga Kerja.

Oleh karena tu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak-Bapak sekalian, yang pertama adalah tentang kesiapan karena sesuai dengan amanah undang-undang SJSN dan Undang-Undang BPJS bahwa 1 Juli besok berarti kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini akan menjalankan program jaminan pensiun waktu yang sangat singkat ini, sejauh mana kesiapan-kesiapan atau hal-hal yang sudah disiapkan oleh Pak Direktur dan jajarannya termasuk juga program jaminan hari tua dan juga program jaminan kecelakaan kerja, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, di dalam Pasal 55 Undang-Undang BPJS dinyatakan ancaman pidana selama 8 tahun dan denda Rp.1 miliar bagi pemberi kerja yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, namun bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya akan mendapatkan sanksi

administratif, berupa tidak mendapatkan layanan publik, bagaimana pihak BPJS Ketenagakerjaan menyikapi hal ini, bagaimana dapat memastikan setiap perusahaan mendaftarkan pekerjanya? Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini mohon penjelasannya.

**Bapak,Ibu sekalian, Pimpinan yang kami hormati.**

Saya rasa dua hal itu yang ingin kami sampaikan mohon klarifikasinya, mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Terima kasih. saya kembalikan.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Irma Suryani silakan.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang terhormat Ketua Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Kawan-kawan dari Komisi IX DPR RI seluruhnya,  
Kemudian yang terhormat Direktur Ketenagakerjaan berikut jajarannya.**

Yang pertama, yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di BPJS, sebagaimana peralihan dari Jamsostek ke BPJS ada perbedaan yang utama dari Jamsostek ke BPJS, beda utamanya itu terletak pada bahwa BPJS juga ikut mengcover pekerja-pekerja informal, artinya ini sudah satu kemajuan besar, lompatan yang besar bahwa kita juga sudah bisa memberikan service yang lebih baik kepada kawan-kawan pekerja informal dengan menghapus diskriminasi yang ada, itu kita memberikan apresiasi yang tinggi untuk itu.

Namun saya ingin yang ingin saya tanyakan kepada kawan-kawan adalah tadi disampaikan untuk sampai dengan Tahun 2018 BPJS tenaga kerja bisa memberikan manfaat dan kepesertaan itu untuk pekerja informal itu hanya 5% kalau tidak salah ya, nah sementara saya lihat disini pekerja formal kita itu kan hanya 41,5 juta kemudian pekerja informal itu mencapai 68,2 juta persen, nah dalam rangka memberikan service kepada rakyat oleh Pemerintah, khususnya bagaimana kita bisa menghapus kemiskinan, mensejahterakan rakyat, ini apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan BPJS untuk memberikan service yang layak, yang baik, tidak diskriminatif terhadap pekerja formal maupun pekerja informal, walaupun itu mungkin tantangannya memang besar, ya tantangannya besar dan memang anggarannya juga harus disiapkan sedemikian rupa oleh Pemerintah, tapi itu tidak bisa dinafikan begitu saja, jika hanya 5% di Tahun 2018 saya kira ini bukan prestasi, jadi mohon dinaikkan targetnya Pak, jangan 5% karena justru yang harus kita bantu itu adalah pekerja-pekerja informal, pekerja formal kita itu sudah relatif sudah cukup sejahtera loh dari sementara pekerja-pekerja informal kita itu luar biasa banyaknya, dan ini yang membuat negara ini di mata dunia itu menjadi turun karena tingkat kemiskinannya tinggi.

BPJS Kesehatan mengatakan sudah memberikan manfaat kepada kartu untuk lebih dari 80 juta kurang lebih kartu, akan mentargetkan 80 juta untuk rakyat miskin, namun klaim Pemerintah bahwa rakyat miskin Indonesia itu hanya 11,6% pada Tahun 2014 kan tidak sinkron ini, ya BPJS Kesehatan mengklaim menyediakan dana untuk rakyat miskin, mengcover kartu untuk rakyat miskin 86 juta sekian, sementara klaim Pemerintah bahwa rakyat miskin di Indonesia itu hanya 11,8% ini kan ada ketidaksinkronan, nah ini yang harus kita sama-sama buka dengan clear sebenarnya berapa sih angka kemiskinan Indonesia ini? Agar dana-dana yang memang di peruntukkan bagi rakyat itu satu, tidak mubazir, tepat sasaran, kemudian manfaatnya juga jelas.

Ini mesti *clear* Pak. Selanjutnya, saya ingin juga menyampaikan ke Bapak bahwa target di akhir Tahun 2000 target kita di target Tahun 2015 itu kan sekitar 22,3% Pak artinya itu lebih dari kurang lebih 50% target sampai dengan Tahun 2015 artinya 50% lebih ya dari target kita sampai dengan tahun 2018, nah jika kita bandingkan dengan apa yang Bapak berikan kepada sektor informal yang cuma 5% di Tahun 2018 pincang Pak, saya ingin menekankan tolong lakukan yang terbaik untuk rakyat, lakukan yang terbaik untuk sektor pekerja informal karena sektor pekerja informal inilah yang betul-betul memang harus kita perhatikan.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan diridhoi oleh Allah SWT, dan kita semua disini mampu mensupport karena memang didukung oleh data dan fakta yang jelas dari BPJS Tenaga Kerja.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya, Pak Imam Suroso silakan.

#### **F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH., MM):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Dirut Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Elvyn dan jajarannya.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Imam Suroso A-172 dari Fraksi PDI perjuangan, Jawa Tengah III, Pati, Rembang, Blora, Gerobokan. Pak Elyvn.

Saya ucapkan terima kasih atas paparannya yang singkat, padat, tetapi bisa kita mengerti. Ya Pak Elvyn sama saja, intinya Pak Elvyn Masassya, saya bisa mengerti, saya juga akan tanyakan tadi Pak Elvyn menyatakan bahwa kecelakaan kerja terbanyak jalan raya baik berangkat kerja maupun pulang kerja itu sangat banyak, pertanyaannya apakah mereka yang kecelakaan kerja seperti itu masih jam kerja ya, dan berangkat kerja itu dapat hak-haknya, santunan-santunannya seperti perjanjian atau program-program daripada BPJS Ketenagakerjaan nanti tolong

dijelaskan. Kira-kira berapa persen yang kasus-kasus seperti itu, nanti dijelaskan juga kemudian berapa persen pula kasus kecelakaan di dalam perusahaan itu. Kemudian, nanti juga tolong dijelaskan ya Pak Dirut kendala-kendala apa yang dialami sampai dari pertama BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang ada kendala-kendala apa, nanti tolong disampaikan juga untuk suksesnya program BPJS Teman-teman Komisi IX DPR RI nanti bisa mensupport solusi maupun termasuk anggarannya, silakan nanti dijelaskan pula.

Kemudian yang ketiga, tadi memaparkan bahwa kecelakaan kerja oleh pekerja kalau sudah sembuh akan diusahakan bekerja lagi, menurut saya itu pekerjaan yang mulia dan manusiawi, pertanyaannya apakah hal itu baru wacana saja ataukah sudah dilaksanakan, apakah hal itu sudah terjadi MoU antara BPJS Tenaga Kerja dengan Perusahaan-perusahaan, tolong nanti dijelaskan ini penting sekali atau kalau perlu perlukah Kemenaker untuk mengawal ini supaya orang yang habis kecelakaan sembuh, dipekerjakan lagi di perusahaan karena biasanya yang sudah sembuh pun perusahaan tidak mau terima, ini tidak manusiawi namanya habis manis sepele dibuang itu tidak bagus, Komisi IX DPR RI akan kawal itu kalau perlu. Kemudian yang keempat Pak Dirut BPJS, terkait dengan dana Jaminan Hari Tua atau JHT yang saat ini belum diketahui persertanya dan masih tersimpan dalam pembukuan BPJS Ketenagakerjaan ada dana sekitar Rp.1,8 trilyun ya 1,8 triliun, namun nilainya berangsur menurun, nilainya berangsur menurun, pertanyaannya nanti mohon di jelaskan BPJS Ketenagakerjaan terkait penurunan dana JHT tersebut mohon dijelaskan.

Kemudian, penurunan tersebut dikarenakan apa? Kok menurun terus, itu sebabnya apa nanti mohon dijelaskan, bukankah BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana kepesertaan agar nilainya meningkat, ini kok malah menurun, punya kewenangan itu nanti tolong dijelaskan.

Kemudian yang terakhir Pak Dirut, yang kelima ya terkait dengan pinjaman dana PT. Jamsostek Persero sebesar Rp.400 miliar kepada PT.PLN Persero, jadi mohon nanti dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan pinjaman tersebut sejumlah 400 miliar, sementara dari saya cukup itu Pak Dirut.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah.*

Selanjutnya Ibu Dewi Asmara silakan.

**F-PG (Hj.DEWI ASMARA, SH., MH):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Rekan-rekan Pimpinan dari BPJS,  
Pimpinan Komisi IX DPR RI beserta Anggota yang saya cintai.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Hajjah Dewi Asmara dari daerah pemilihan Jabar IV, Fraksi Partai Golkar.

Pertama-tama, berkaitan dengan grand design atau pun bahan yang diberikan oleh Direksi daripada BPJS Tenaga Kerja atau dulunya Jamsostek kepada kami, terus terang saja Pak semua memang nampak indah tapi dalam hal ini kami mengingatkan sebentar lagi Bapak-bapak sekalian dan Ibu akan memasuki atau membuka buku baru dengan melaksanakan yang namanya program jaminan untuk tenaga kerja BPJS Tenaga Kerja pada bulan Juli tahun ini, tentunya untuk memasuki lembaran baru bukan berarti kami tidak melihat bagaimana proses peralihan itu terjadi terutama berkaitan dengan tata kelola keuangan dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh Para Direksi Jamsostek, berkaitan dengan hal tersebut, kami ingin meminta penjelasan dalam hal ini sekaligus juga menyampaikan kepada Pimpinan karena Pimpinan-pimpinan di Komisi kami kebetulan sebelumnya belum bertugas di Komisi IX DPR RI.

Ada beberapa hal yang perlu kami kemukakan pada Pimpinan dan Teman-teman Anggota sekalian berkaitan dengan temuan BPK, tentunya BPK sebagai mitra daripada DPR RI memberikan masukan atas temuan-temuannya kepada kami secara resmi nah di dalam temuan-temuan BPK alangkah mengejutkan kami, ketika kalau kita berbicara untuk Tahun 2014 saja Pak tidak saya hitung secara keseluruhan tapi paling tidak ada gambaran di saya sekitar dana sejumlah Rp.5 triliun yang memerlukan penjelasan dari Bapak-bapak sekalian bagaimana penanganan atas temuannya, contohnya Pak misalnya yang pertama saja, pengelolaan dana pengembangan JHT yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, dimana peserta Jamsostek tidak memperoleh pengembangan dana JHT tepat waktu sejumlah Rp.1,3 triliun serta berkurang Rp.25 miliar belum dapat dijelaskan. Kemudian yang kedua, PT.Jamsostek membebaskan kerugian atas pengalihan program JHT eks PT.Taspen sebesar Rp.27,2 miliar.

Kemudian yang berikutnya, reklasifikasi dana pengembangan non JHT ke cadangan umum sebesar Rp.1, 198 triliun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga mengurangi pengalihan aset dari PT.Jamsostek ke BPJS. Kemudian yang berikutnya, PT.Jamsostek tidak membagikan hasil investasi ke dana pengembangan non JHT milik peserta Jamsostek dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013 sebesar Rp.594,2 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan kurang membagikan dana pengembangan non JHT ke dalam masing-masing program DJS terbesar Rp.1,7 triliun sesuai dengan proporsi pengalihan aset yang telah ditentukan, artinya itu saja Pak sebetulnya masih banyak itemnya kira-kira ada 14, tapi saya mencoba menghitung bahwa disitu ada potensi sebesar hampir Rp.5 triliun, bukan berarti kami menganggap Rp.5 triliun ini hilang ataupun disalahgunakan tapi paling tidak untuk prinsip kehati-hatian pengelolaan dana yang sedemikian besar tentunya wajib disampaikan kepada kami bagaimana penanganan mengenai laporan-laporan BPK, yang saya sebutkan itu hanya 5 Pak, diantaranya yang kecil-kecil yang mungkin tidak saya perhitungkan tetapi itu penting antara lain adalah yang dipertanyakan rekan kami terdahulu Saudari Rieke mengenai pekerjaan TV program jam season 1 dan 2, dalam temuan BPK dikatakan dilaksanakan secara ....**(tidak jelas)**.... Tidak sesuai ketentuan realisasi biaya senilai Rp. 7 miliar.

Nah jadi tentunya hal ini bagi kami adalah masih ditambah dengan yang pada saat periode lalu kami membentuk Panja untuk mengawasi juga kinerja daripada Jamsostek, ketika itu Pak pada Tahun 2013 ada sisa beban klaim JHT usia 55 tahun yang juga waktu itu adalah temuan BPK Tahun 2013 saja itu belum selesai, sebesar



Rp.1,4 triliun dimana target penyelesaiannya adalah 31 Desember 2013, ketika dalam Panja kami sampaikan ada sejumlah nilai dari besaran itu yang dikatakan oleh Bapak belum bisa kami bagikan kepada peserta karena pesertanya tidak diketahui lagi dimana alamatnya kurang lebih seperti itu penjelasan apa di dalam Panja, dan di dalam Rapat Kerja pada bulan Februari 2013, sepengetahuan kami disampaikan akan bekerja sama dengan pembuatan e-KTP untuk mengetahui alamat atau bahkan lebih jauh dikatakan bila perlu kami akan menitipkan kepada Balai Harta peninggalan sampai dengan akhir Tahun 2013.

Oleh karena, memang kesibukan pada saat itu kita memasuki April 2013 dan selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Jamsostek untuk melakukan dan mungkin Rekan-rekan terlibat kepada juga masa kampanye sehingga kemudian isu ini sudah berganti di isu dengan bagaimana bertransformasi menjadi BPJS Tenaga Kerja, nah ini kemudian menjadi terlupakan, padahal kami justru sekarang ingin menanyakan kembali bagaimana nasibnya kalau betul itu sudah dititipkan di Balai Harta Peninggalan, pada Tahun 2013 karena itu uang banyak, itu uang yang belum dibagikan.

Nah, ini adalah baru pertanyaan saya yang pertama dan meminta klarifikasi itu dan mungkin kalau sekarang dijawab yang sifatnya pokok-pokoknya tapi kami minta penjelasan tertulis kepada Pimpinan sebagai bahan masukan kami atas keseluruhan temuan BPK, karena ini adalah salah satu fungsi pengawasan yang kami lakukan, bagaimana mungkin kita mau mengelola sesuatu yang akan lebih besar apalagi dananya insyAllah kemudian bisa juga dipakai untuk dana pembangunan sementara ada beberapa dana-dana yang perlu klarifikasi, tentunya kami sampaikan ini karena justru perhatian dan atensi kami dan harapan besar pada kami yang kami taruh untuk pengelolaan BPJS Tenaga Kerja ini sehingga kami memerlukan klarifikasi tersebut, siapa tahu tidak semua Bapak-bapak Direksi yang disini mungkin juga pada saat itu ikut dalam pengambilan keputusan, tapi juga jangan sampai kemudian menjadi tidak jelas sebelum memulai yang baru, itu adalah yang pertama.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan tadi dikatakan ada manfaat-manfaat tambahan akan mengadakan perumahan, beasiswa dan lain-lain sebagainya, yang kami ingin tanyakan sebetulnya adalah kebijakan policy daripada pengelolaan investasi apabila ingin diberikan manfaat berapa sebetulnya dari pengelolaan aset tersebut yang dialokasikan secara proporsi untuk masing-masing program, misalnya untuk sakitnya, kemudian untuk kecelakaan kerjanya, kalau kemudian perumahan berapa, apakah itu dihitung dari setiap peserta secara persentase atau prosentase dari hasil pengelolaan seluruh aset berikut investasinya tentunya, karena ini perlu jelas kepada kami, jangan sampai apa yang disampaikan tadi oleh rekan kami terdahulu juga ingin kami perdalam akhirnya bisa terkesan melakukan sesuatu yang diniati dengan baik tapi akhirnya menjadi *over expend* dengan mengadakan nanti perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi developer membangun rumah atau menjadi apa pun dalam artian disini, kami hanya ingin tahu bagaimana mengimplementasikannya, karena kami menghargai manfaat-manfaat ini tapi kami juga ingin tahu jika seorang menjadi peserta dari BPJS Tenaga Kerja dengan manfaat-manfaat itu, bagaimana pola pengelolaannya? persentasi dari alokasi dana yang mereka sudah berikan iuran, dan tentunya disamping itu juga yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kepesertaan, bagaimana mencegah jangan terjadi duplikasi dan ada beberapa masukannya mengatakan bahwa ketika masih Jamsostek fasilitas kesehatannya lebih baik daripada ketika sudah ikut nanti BPJS.

Nah pertanyaannya tentu ada perbedaan nilai perbedaan nilai yang dibayarkan oleh BPJS Tenaga Kerja atau dulunya Jamsostek, dari yang tadinya katakanlah membayarnya lebih mahal, fasilitas lebih bagus, kemudian lebih murah uang itu apakah bisa dikembalikan lagi, apakah langsung melalui pengelolaan atau ada manfaat apa yang bisa diterima sehingga kesannya orang yang ikut BPJS Tenaga Kerja itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat dana mungkin terakhir kami memintakan juga kepada Pimpinan melalui forum rapat hari ini untuk diambil dalam keputusan adalah menentukan daripada Panja, sebelum kita sampai kepada berlakunya BPJS Tenaga Kerja adalah bagaimana kita memeriksa kembali proses peralihan paling tidak klarifikasi apa yang tadi saya sampaikan temuan BPK Tahun 2013, 2014 dan juga jaminan yang belum dibayarkan dari Tahun 2011 sampai 2013 apalagi yang konon katanya tenaga kerjanya tidak bisa dicari lagi, jadi kita di satu sisi pemerintah akan mewajibkan semuanya ikut tapi ketika kemudian tenaga kerja mungkin meninggal atau mungkin pindah alamat atau tidak register kembali kemudian menjadi A non, dana tidak bertuan, nah ini tentunya harus kita hindari sehingga dalam Panja tersebut tidak hanya kita mengklarifikasi soal hal tersebut, tapi kita betul-betul bisa mendalami untuk membantu BPJS Tenaga Kerja ini agar ketika berjalan jangan sampai carut marutnya terjadi seperti di BPJS Kesehatan yang berlaku dengan kesan terburu-buru. Jadi tidak lain hal ini kami maksudkan justru untuk membantu bagaimana suksesnya dari program BPJS Tenaga Kerja ini, suksesnya Bapak-bapak sekalian adalah sukses dari pada Komisi IX DPR RI, demikian juga sebaliknya.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ibu Hayatul.

**F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang terhormat Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Rekan-rekan Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja.**

Saya Nihayatul Wafiroh, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Anggota A-65, Dapil Jawa Timur III Banyuwangi, Situbondowoso.

**Bapak Direktur BPJS yang saya hormati.**

Tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini, sejak kemarin di twitter dan facebook saya, saya sudah bilang bahwa saya hari ini akan bertemu dengan Direktur BPJS Tenaga Kerja, jadi banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat terkait program ini Pak. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwasannya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dari masyarakat dan itu mungkin juga

menjadi PR (Pekerjaan Rumah) terbesar kita bukan hanya bagi Kawan-kawan di BPJS tetapi juga kita di Komisi IX DPR RI terkait sosialisasi yang merata Pak, yang pertama adalah soal sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan asuransi, maaf tidak membayarkan BPJSnya, tadi disampaikan oleh Pak Hamid bagaimana di undang-undang sudah jelas bagaimana punishment tersebut tetapi kenyataannya masih banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar dengan tepat waktu, untuk itu saya menyarankan bagaimana kalau dalam tiap berapa bulan sekali perlu diungkapkan, di-*release* ke publik tentang Perusahaan-perusahaan yang baik, yang membayar tepat waktu dan Perusahaan-perusahaan yang tidak membayar, itu menjadi punishment secara sosial kepada perusahaan tersebut.

Yang kedua Pak, banyak sekali kebingungan tentang *coverage*, bedanya *coverage* tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pak, jadi apakah ini hanya subjeknya saja yang berbeda atau *coveragenya* yang juga berbeda? Terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana BPJS tadi juga mengcover, mensupport bagaimana yang terjadi kecelakaan JKK lalu direcovery lalu bagaimana didorong untuk bisa masuk ke perusahaan itu lagi, seperti dikatakan Pak Imam tadi bahwa kami juga mengapresiasi langkah itu, itu apresiasi yang luar biasa sekali Bapak bisa mendorong pekerja yang kecelakaan lalu bisa masuk kembali, nah yang perlu saya tanyakan sebenarnya sudah seberapa efektifkah program ini Pak karena sepanjang saya tahu kebetulan saya aktif di lembaga difable, untuk mensupport Kawan-kawan difable, ini banyak sekali Kawan-kawan difable bahwa kawan-kawan difable yang karena kecelakaan atau kawan difable yang asli difable yang tidak tercover di tenaga kerja, yang tidak mendapat tenaga kerja lalu apakah yang dilakukan kalau ternyata didorong untuk masuk ke ke perusahaan itu kembali tapi tidak diterima apa yang bisa dilakukan kira-kira seperti itu Pak, kalau bisa mungkin saya minta datanya dari program ini, berapa data yang sudah ada, berapa orang yang sudah bisa direcovery lalu disupport untuk mendapat pelatihan dan bisa masuk kembali ke perusahaan itu kembali Pak.

Yang kedua, soal protes-protes soal ini Pak bagaimana kalau mengatakan BPJS ini program nasional tapi rasanya masih rasa kecamatan Pak, dalam artian kan kita butuh rujukan ada kasus yang dia bekerja di luar kota yang KTP nya masih kota asalnya, lalu ketika mengurus itu ternyata KTP nya masih harus KTP di daerah rujukannya seperti apa dan sebagainya, sebagainya itu menjadi persoalan itu yang karena berpindah tempat kerja Pak, jadi dia *coveragenya* di tempat kerja lalu berpindah tempat kerja, lalu seperti apa-seperti apa, itu menjadi masukkan-masukkan yang saya terima selama 2 hari ini dari masyarakat tentang BPJS tenaga kerja ini, juga mungkin pengawasan Pak, pengawasan yang tadi kaitannya dengan pertanyaan saya pertama pengawasan yang kepada Perusahaan-perusahaan itu yang perlu ditingkatkan, begitu Pak dari saya terima kasih. Semoga BPJS ini bukan hanya BPJS program nasional yang berasa kecamatan tapi memang benar-benar BPJS program nasional yang berasa nasional juga.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya pada Ibu Siti Masrifah silakan.

**F-PKB (Dra.Hj. SITI MASRIFAH, MA):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi IX DPR RI dan seluruh Rekan-rekan di Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang hadir beserta seluruh jajaran.**

Pertama perkenalkan nama saya Siti Masrifah dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Banten III, Nomor anggota A-77. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati. Saya melihat dari paparan yang ada saya menghargai ada satu semangat untuk perubahan, tetapi masih saya melihat ini yang dipaparkan lainnya garis-garis besar, kalau orang bilang garis-garis besar haluan negara sehingga rincian kecil-kecilnya kita tidak melihat di paparan yang sudah ada ini, satu. Program bagus, desain bagus percuma itu dibuat kalau kemudian tidak ada sosialisasi yang itu juga menunjang program yang sudah dicanangkan, ada beberapa hal yang tadi saya kira sudah dicermati oleh Teman teman dari Komisi IX DPR RI, saya hanya ingin menambahkan satu, saya ingin menanyakan atau mempertajam kepada jajaran BPJS Tenaga Kerja, saya melihat tadi di paparan Bapak sampaikan bahwa ada integrasi payment channel, yang itu ada 2 channel pembayaran iuran, satu melalui IBS berbasis internet, yang kedua IBS berbasis *virtual account*, saya ingin atau mohon penjelasan data berapa sesungguhnya peserta yang sudah mendaftar melalui IBS berbasis internet dan di IBS berbasis *virtual account*, satu.

Yang kedua, saya ingin tahu karena tadi di presentasi Bapak sampaikan bahwa data IBS yang berbasis internet itu ditujukan kepada perusahaan baru, menengah, perusahaan yang pengelolaan data PII, saya ingin tahu yang menginput data ini karyawan atau perusahaan yang mendaftar, ya mohon penjelasan. Kemudian, IBS berbasis *virtual account*, Bapak sebutkan di dalam presentasi ada tiga, satu perusahaan mikro, perusahaan kecil dan perorangan dengan jumlah tenaga kerja atau iuran yang relatif kecil, ini kami ingin tahu juga karena begini, ada beberapa kasus di masyarakat mereka merasa kesulitan satu, dia bingung antara BPJS Ketenagakerjaan an BPJS Kesehatan, mereka merasa "mba, kok saya pegang 2 kartu yang sama-sama namanya BPJS", ini saya kira perlu penjelasan kepada masyarakat soal kartu BPJS bagi masyarakat terutama yang bekerja di perusahaan mikro, kecil dan iuran yang relatif kecil, karena kalau mereka yang sudah menengah dia bisa mengakses melalui internet tadi, saya kira beberapa hal yang disampaikan, ini kan tadi saya melihat juga ada berupa e-services yang tadi Bapak sampaikan memang bagus sekali e-IPS pelayanan sistem, e-registrasi, c-online, ada beberapa hal yang saya kira ini bagus secara desain program, tapi saya tidak tahu pelaksanaannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan bagus seperti yang dicanangkan. Yang saya pertanyakan satu lagi ada RSTC ( Rumah Sakit Trauma Centre) nah saya ingin tahu ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa dan untuk kasus apa? Diperuntukkan untuk kasus apa.

Yang terakhir, dana tak bertuan beberapa kali kita berkunjung ke daerah kita menemukan bahwa ada sesungguhnya beberapa dana yang tidak bertuan, bahkan ketika saya turun ke Dapil ke Tangsel itu karyawan itu menanyakan "Bu, saya ini sudah pernah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, saya pindah ke perusahaan lain saya harus memulai lagi dari awal karena ketidaktahuan tadi ya, padahal kan kalau

seandainya informasi itu bisa sampai ke masyarakat bahwa kalau sudah mengikuti sudah bisa dipindahkan langsung, ini saya kira sekali lagi sosialisasi yang sangat kurang dan karena sosialisasi yang sangat kurang uang yang sudah mengendap selama bekerja di perusahaan awal, itu dia tidak tahu kemana dia mau diambil uangnya itu, ini mohon ada skema sosialisasi penjelasan kepada masyarakat ini kemudian dana jaminan hari tua yang belum diklaim atau kita tahu bahwa ternyata klaimnya dibatasi oleh apa ya oleh waktu, nah selama dibatasi oleh waktu ternyata dia tidak ambil dana jaminan hari tua ini, nah karena ketidaktahuan itu sehat fitnah ini juga bagaimana nasib dana yang tidak bertuan ini, kalau toh kemudian ini dititipkan kepada misalnya apa yang disebut disitu ada BHP (Balai Harta Peninggalan) atau sekarang dikembalikan ke BPJS, Tenaga Kerja kembali, pengelolaan uang yang sebesar itu, kita ingin tahu secara transparan berapa dana yang tidak bertuan ini, yang saat ini dikelola atau dipegang oleh BPJS.

saya kira itu Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati. Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Saniatul Lativa.

#### **F-PG (Hj. SANIATUL LATIVA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Dirut BPJS beserta seluruh jajarannya.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan meskipun sudah disampaikan oleh Teman-teman yang terdahulu baik itu masalah sanksi administratif, bagi perusahaan ataupun kontraktor yang tidak menyetorkan dana BPJS atau tidak mendaftarkan karyawannya ke pihak BPJS, namun itu tidak saya tanyakan kembali, tetapi ada satu hal yang ingin disini saya sampaikan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 yang lalu, Bapak Elvyn telah menemui Bapak Presiden untuk menyampaikan laporannya tentang kesiapan BPJS dalam pelaksanaan 1 Juli 2015, dana kelola pada akhir Tahun 2014 yang siap dikelola ada pada akhir Tahun 2014 yang siap kelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp.187 triliun dengan imbal hasil Rp.17,3 triliun.

Nah, dalam kesempatan itu juga disampaikan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPJS Ketenagakerjaan berencana akan membangun rumah bagi pekerja atau housing benefit, nah yang ingin saya tanyakan disini perumahan tersebut itu diperuntukkan bagi pekerja informal atau formal, nah kalau untuk pekerja informal kami sangat setuju sekali karena merekalah yang memang betul-betul membutuhkan itu, tetapi kalau bagi pekerja yang barangkali jabatannya tinggi maka rumah tersebut bisa dibilang tidak bermanfaat, karena kenapa? Rata-rata yang sudah berpenghasilan tinggi mereka sudah memiliki rumah sendiri, ini yang saya tanyakan kepada Bapak Elvyn mohon penjelasannya dan juga

mengenai sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, karena masih banyak sekali Pak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS.

Terima kasih itu saja saya akhiri.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Hj. Saniatul Lativa. Fraksi Partai Golkar A-243 Dapil Jambi.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kepada Ibu Andi Fauziah silahkan.

#### **F-PG (Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,  
Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua,  
Om Swastiastu.**

Pada pertemuan pagi hari ini saya hendak menyorot soal kebijakan iuran jaminan hari tua, dengan memperbandingkan bagaimana besaran iuran Negara-negara tetangga kita, tidak usah jauh-jauh kita membandingkan dengan Negara-negara di Eropa barat ataupun Skandivia, yang mempunyai tradisi negara kesejahteraan yang sangat kuat atau *welfare state*, kita cukup memperbandingkan dengan Negara-negara yang ada di kawasan ASEAN dan Negara-negara di kawasan Afrika yang menurut saya tingkat kesejahteraannya jauh dibawah negeri kita sendiri, total besaran iuran di Singapura itu mencapai 40% dengan pembagian 20% orang pemberi kerja, 20 persen oleh pekerja, sedangkan di negara Malaysia totalnya iurannya 23% dengan pembagian 12% oleh pemberi kerja dan 11% oleh pekerja, untuk negara Filipina totalnya 8% dengan pembagian 4,7% pemberi kerja dan 3,7% oleh pekerja, di Afrika sebagai perbandingan saya ambil data yang saya dapat adalah negara Tanzania dengan total iuran 20%, masing-masing 10% oleh pemberi kerja dan pekerja ....**(tidak jelas)**.... Totalnya 15% dengan pembagian 10% pemberi kerja, 15% pekerja, sedangkan Indonesia sejauh ini yang saya ketahui hanya sebesar 5,7% dengan pembagian 3,7% pemberi kerja dan 2% pekerja dari nilai upah.

Kesimpulannya bahwa total iuran jaminan hari tua di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan Negara-negara tetangga kita di negara ASEAN, dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tumbuh tinggi dan stabil di kisaran 5% sampai 6% cukup beralasan bagi saya untuk merevisi besaran iuran jaminan hari tua tersebut untuk memberikan jaminan sosial yang lebih memadai untuk tenaga kerja kita, pertanyaan yang saya

ajukan itu kira-kira jika menurut BPJS Ketenagakerjaan berapa kisaran kenaikan yang tepat untuk kepentingan Indonesia yang menguntungkan tenaga kerja kita sekaligus untuk iklim yang kondusif, untuk iklim investasi.

Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa saya sangat menyambut baik bagaimana dengan agenda jaminan pensiun dengan tetap mempertahankan jaminan hari tua jauh berbeda dengan usulan sebagian pengusaha yang menginginkan penggantian JHT jika jaminan pensiun sudah terselenggara, alasannya saya sederhana saja pertama, bahwa meskipun saat ini situasinya belum dikatakan baik, namun saya punya keyakinan yang kuat bahwa dengan membaiknya status kesehatan masyarakat usia harapan hidup akan makin panjang, sehingga usia pensiun penduduk kita ke depannya tentu akan lebih produktif. Bagaimanapun pekerjaan adalah soal martabat, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan cenderung merasa martabatnya lebih rendah, sehingga menurut saya jaminan hari tua dapat menjadi modal usaha sehingga tetap produktif, sehingga jaminan pensiun untuk mendukung daya beli pekerja memasuki usia pensiun sehingga tidak saja positif buat diri bekerja, tapi juga positif buat perekonomian secara keseluruhannya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah sejauh mana keterlibatan stakeholder terkait khususnya dari unsur masyarakat terwadahi dan terakomodasi dalam struktur BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya profesional dan teknokrat Pemerintah tetapi juga serikat pekerja yang berkepentingan secara langsung dengan manfaat BPJS Kesehatan ini, hal ini menjadi lebih urgent jika ditinjau ulang terkait dengan penambahan program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup sektor informal dan jasa konstruksi, sejauhmana pemangku kepentingan tersebut dilibatkan dalam program BPJS.

Yang terakhir adalah justru BPJS dan pasar modal, yang sangat penting untuk dicermati adalah pengembangan usaha BPJS ke pasar modal, dalam hal ini saya berharap bahwa tidak ada salahnya kita untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, kenapa saya mengatakan seperti itu karena globalisasi dan interpedensi dalam sektor modal finansial saat ini salah satunya memunculkan efek makin rentannya perekonomian suatu negara atas guncangan eksternal, saya rasa kita sudah pernah mendengar dan seharusnya belajar dari pengalaman krisis yang ada, bahwa ketika krisis terjadi salah satu yang kerap menjadi korban adalah hilangnya dana pensiun pekerja yang dipertaruhkan di pasar modal, salah satu faktor penyebab mengapa Indonesia relatif lebih rentan terhadap guncangan krisis global Tahun 2007, 2008 yang saya rasa sampai saat ini masih berlanjut, adalah karena sektor finansial kita yang relatif tidak terintegrasi dengan relatif tidak terintegrasi secara kuat dengan financial global, sehingga kita tetap mempunyai daya tahan dan mampu tumbuh dengan stabil pada saat Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat masih bergulat dengan krisis, sehingga saya merasa bahwa perlu ada regulasi yang berhati-hati dan terukur terkait agenda pengembangan BPJS Ketenagakerjaan ke pasar modal, salah satunya mungkin adalah regulasi tentang jumlah maksimal modal yang dapat dipertaruhkan di pasar modal yang tentu saja menjamin yang tidak saja menjamin kontinuitas keuntungan, namun terutama tidak mempertaruhkan dan mengganggu jaminan keamanan dana tenaga kerja kita, yang saya tegaskan disini adalah kita sangat perlu untuk tetap terukur dan sangat berhati-hati, sehingga saya mengharapkan agar pengelola BPJS memperhatikan hal ini dengan seksama.

Terima kasih. Andi Fauziah A-315 dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan III.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Susi Sadona.

**F-GERINDRA (SUSI MARLENY BACHSIN, SE.,MM):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai yaitu seluruh Rekan-rekan di Komisi IX DPR RI dan yang saya hormati Direktur BPJS beserta jajarannya.**

Pertanyaan saya, saya rasa ini pertanyaan yang sudah orang-orang pertanyaan sejak dahulu, kalau yang saya tanyakan adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri Pak, yang kita ketahui bahwa selama ini Pemerintah tidak pernah memberi ya, tidak pernah memberi jaminan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri kemudian lagi, padahal kita harus tahu bahwa powernya atau pun pahlawan devisa kita itu adalah berasal dari Tenaga Kerja Indonesia yang berada diluar negeri, kemudian seperti ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua mereka juga tidak mempunyai Pak, sementara memang kita butuh mereka untuk bekerja disana karena yang tadi saya katakan mereka betul-betul adalah devisa atau pun pemasukan untuk negara kita ini, pertanyaan saya salah satunya adalah bagaimana Pemerintah sekarang ini, dalam hal ini pihak pengelola BPJS memberi jaminan bahwa TKI legal dan ilegal diluar negeri itu akan mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan Pak, kemudian lagi, langkah-langkah seperti apa sih yang BPJS itu dapat melakukannya.

Kemudian, ada lagi pertanyaan saya, menurut orang-orang banyak ya Pak ya, katanya tapi memang saya berinteraksi langsung dengan di Rumah-rumah sakit, apakah ini betul ataupun tidak saya juga hanya ingin mempertanyakan kepada BPJS Pak kalau ada yang masuk ke rumah sakit ya, mereka selalu mengeluh oh iya BPJS ini pembayarannya katanya sangat sulit atau pun sangat lamban, ke Rumah-rumah sakit, apakah betul ini atau tidak, justru saya ingin sekali penjelasan dari Bapak Bapak yang ada di BPJS. Kemudian lagi, pertanyaan yang saya lagi adalah sebenarnya kecil-kecil Pak yang ada di buku panduan ini yang tadi Bapak katakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 6 dan Pasal 9, tentang jaminan kecelakaan kerja.

Nah yang ingin saya tanyakan adalah pekerja yang seperti apa Pak yang mendapat jaminan ini karena yang waktu itu kita ada RDPU pada saat itu yaitu tenaga kerja dari PLN Pak, mereka mengatakan sangat miris kondisinya, mereka mengatakan bahwasanya banyak sekali tenaga kerja ya yang artinya memang tidak mendapat jaminan, padahal mereka itu yang dibutuhkan tenaganya di dalam perusahaan tersebut, contoh misalnya mereka jatuh dari atap geletak, ya geletak saja Pak, dibawa pulang kerumahnya, masih syukur masih hidup, jadi ke depannya



BPJS saya harapkan lebih lagi banyak manfaatnya kepada masyarakat, artinya tenaga kerja tenaga kerja yang betul-betul berprofesi yang mungkin profesinya itu luar biasa, walaupun pendidikannya yang pada saat waktu mereka masuk ke perusahaan tersebut, itu bukan S1 Pak tetapi pada saat dia bekerja itu mereka akan mengajarkan orang-orang yang baru masuk, jadi itu memang pekerja-pekerja yang handal sesungguhnya, itulah yang harusnya BPJS itu concern dengan orang-orang seperti itu.

Kemudian lagi, saya juga memperkuat pendapat dari Rekan saya yaitu Mbak Dewi, karena agar apa namanya temuan-temuan yang ada di BPK di Tahun 2014, agar dapat Pak, artinya dilaporkan kepada kita semua sebelum program ini terlaksana Pak, jadi jangan sampai nanti programnya sudah keluar nanti semuanya ini terdapat artinya laporan-laporan ini tidak sinkron dengan apa yang diinikan, jadi saya rasa ini apa namanya saya sependapat dengan Mbak Dewi bahwasanya ini tolong Kami-kami ini juga tolong diberikan laporan-laporan walaupun laporan itu baik panjang ataupun singkat tapi kami paling tidak mengerti Pak.

Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir dari saya yaitu berkaitan dengan pengalihan pegawai Pak, PT.Jamsostek diketahui memiliki banyak pegawai yang outsourcing Pak, nah jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana kebijakan BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan 100 pegawai outsourcing tersebut mengingat jumlah yang bukan sedikit Pak, ya tenaga outsourcing itu hampir di setiap perusahaan itu semuanya rata-rata itu outsourcing, kemudian lagi yang telah ada rekomendasi dari Panja Outsourcing Pak, Komisi IX DPR RI untuk menghapuskan outsourcing di BUMN, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, mudah-mudahan ke depannya BPJS dapat bekerja sama dengan Pemerintah artinya kemudian lagi masyarakat Indonesia ini lebih nyaman dan lebih sehat lagi Pak.

Terima kasih Pak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Yang selanjutnya kepada Ibu Amelia dipersilakan.

#### **F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi IX DPR RI yang saya hormati, Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya yang saya hormati.**

Perkenalkan saya Amelia Nomer Anggota A-17 dari Dapil Jawa Tengah VII, Fraksi Nasdem.

Saya akan bertanya langsung pada poin pertanyaannya Pak Dirut, bagaimana progress penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur soal hal teknis jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, mengingat jaminan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan akan dioperasikan pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang, nah saya

ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh rekan Pak Djoni untuk buruh nantinya akan iurannya akan ditetapkan berapa persen Pak? Kemudian juga, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh buruh? Hal lain hingga kini pengusaha masih mempersoalkan besaran iuran yang harus ditanggung oleh pemberi kerja, pasalnya pemberi kerja merasa masih banyak kewajiban yang harus mereka tanggung kepada para pekerja seperti soal kewajiban BPJS lainnya, jadi ada BPJS Kesehatan kemudian penyediaan transportasi, fasilitas kesehatan dan lain-lain kondisi perusahaan juga harus dijadikan pertimbangan Pak, misalnya perusahaan skala sedang hingga besar tentunya akan berbeda pengcoverannya dibandingkan dengan perusahaan skala kecil hingga perusahaan skala mikro ya, karena itu pemerintah jangan pukul rata kebijakan ini kepada seluruh pemberi kerja, singkat saja pertanyaan saya, mohon penjelasan dari Bapak Dirut.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Sudah 16 penanya yang terdaftar di meja Pimpinan yang mengajukan pertanyaan, sebelum dijawab oleh Dirut BPJS, saya ingin menanyakan kepada seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat barangkali ada yang belum terdaftar dan ingin bertanya untuk melakukan pendalaman tidak ada? Cukup? Cukup, Pak Ketua? Silakan.

**KETUA KOMISI IX DPR RI/F-PD[DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.Si:**

Terima kasih Bu Erna.

**Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pak Dirut, Pak Elvyn.**

Kenalkan Pak nama saya Dede Yusuf, Dapil Jabar II Pak. Saya pikir masalah BPJS Ketenagakerjaan ini adalah isu yang juga salah satu prioritas di Komisi IX DPR RI, karena Komisi IX DPR RI itu kan kurang lebih kesehatan kan, ketenagakerjaan, jadi artinya kita akan menjadi mitra selama 5 tahun, dan harus menjadi mitra yang produktif dan juga mitra yang saling komunikatif. Saya pikir, saya ini saya, Rieke ini dulu calon Gubernur Jawa Barat Pak, dan ditempatkan di Dapil yang isinya banyak para pekerja, Rieke di Karawang, Bekasi, saya di Kabupaten Bandung Barat itu isinya industri semua, jadi setiap hari pasti pertanyaannya seputar pekerja, seputar buruh, jadi oleh karena itu saya minta nanti Pak Elvyn beserta Direktur yang lain juga untuk kita saling komunikasi dengan baik, ini banyak titipan sekali.

Saya ingin bertanya Pak, ini yang penting sekali, mungkin tadi sudah dipertanyakan ya bagaimana nasib dari ada 900 orang verifikator Jamsostek, dulu Jamsostek bahkan sudah dibayarkan melalui rekening Jamsostek pada rekening karyawan, saya baca juga di berita katanya sudah di berikan pesangon total, tapi isu

ini masih bergulir terus, ini penting Pak karena begini ketika kita berbicara BPJS Ketenagakerjaan artinya kita berbicara uang dari para pekerja, dari buruh, sementara kalau dari BPJS Ketenagakerjaan itu juga menisbikan atau menihilkan peran-peran daripada para pekerja, ini akan berdampak besar sekali, jadi saya mohon nanti kebijakan bagaimana cara mengatasi atau menentukan nasib dari para mantan-mantan pekerja verifikator, mungkin dulu pernah dikatakan oh ini BUMN dulu, sekarang kita bukan BUMN kita badan maka kita lepas, tidak bisa Pak. Bapak punya Rp.187 triliun, uang yang berasal dulunya adalah dari para pekerja dan buruh, ini tadi dari sekian banyak pertanyaan saya lihat ini BPJS seperti kayak Bank besar, dengan dana yang besar, dengan penempatan penempatan yang besar, namun kalau saya lihat disini data yang penempatan apa namanya untuk jaminan hari tua ini terbesar sekitar Rp.10 triliun, sementara untuk yang apa namanya kesehatan dan lain-lain mungkin hanya ratusan miliar saja.

Oke, pertanyaan kedua Pak, Bapak mengatakan tadi di dalam presentasinya bahwa BPJS ini selain untuk jaminan hari tua dan sebagainya juga ada untuk transportasi, untuk properti perumahan dan juga untuk *food* dan sebagainya, saya setuju, saya mengapresiasi sekali rencana pemerintah untuk mendorong agar lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaat daripada BPJS ini, tapi khususnya pekerja Pak, jadi ketika Bapak tadi mengatakan ingin membuka perumahan-perumahan pekerja, kendalanya adalah di lahan, apakah lahan ini bekerja sama dengan Pemda atau bisa dengan swasta? Ya artinya kan kalau kita bicara rumah pekerja buruh itu kalau kos-kosan kira-kira sekitar Rp.600.00,- atau Rp. 700.000,- berarti kalau membeli rumah hanya dibawah Rp.20 juta artinya rumah yang yang mampu dibeli oleh para pekerja, dimana saja, sebab kalau tidak salah Tahun 2012 sudah ditetapkan bahwa Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan harus membangun beberapa rumah sakit atau rusunawa, sudah berapa yang dibangun Pak? Di daerah saya belum ada yangdi bangun Pak, bahkan saya sempat mengeluarkan satu apa namanya satu pernyataan bahwa untuk Daerah-daerah yang kawasan industri rumah sakit khusus pekerja atau buruh ini perlu, Bapak sudah membangun kalau tidak salah di mana Jakarta nih? Cakung atau dimana itu? Di Cakung kalau tidak salah ya, nah mungkin nanti di Karawang harus bikin ya, di Bandung, Kabupaten Bandung juga harus bikin dimana lagi Pak? Tangerang ini daerah Banten sana ya? Bekasi ya, pokoknya yang daerah-daerah industri Bapak harus bangun itu, karena sekarang rumah sakit membludak, banyak orang yang ingin masuk ke rumah sakit membludak, permasalahan BPJS Kesehatan cukup banyak, saya rasa perlu juga dibangun itu Pak.

Lalu kemudian, saya ingin tanya nilai jaminan kematian dan hari tua itu sebenarnya berapa? Apakah bisa di upgrade atau tidak? ini pertanyaan dari masyarakat, tadi dari tadi saya sudah mengupload terus ke Twitter dan banyak yang bertanya, saya juga ingin tahu bagaimana BPJS TK ini bisa mengena ke sektor informal karyawan toko, buruh, industri rumahan, supir, PKL karena tadi kan ada pengembangan ya,i pekerja mana saja yang akan kena? Karena dengan penambahan nanti dari TNI, Polri, PNS diperkirakan anggaran Bapak di akhir Tahun 2015 mencapai Rp.200 triliun lebih, mungkin Rp.220 triliun, artinya sebetulnya banyak yang bisa dilakukan Pak, Rp.220 triliun itu adalah anggaran pendidikan untuk APBN kita, sementara dari BUMN mungkin dari semua slot-slot kami saja disini kita anggaran kesehatan hanya Rp.40 triliun Pak, sementara BPJS Tenaga Kerja punya Rp.220 triliun di akhir Tahun 2015, harus banyak yang bisa dibikin. Itu monorel DKI Jakarta itu kalau tidak salah hanya Rp.8 triliun ya, kalau mungkin nanti

Bapak bisa bikin transportasi untuk pekerja buruh mengurangi cost-cost transportasi mereka, saya pikir tidak ada masalah itu.

Kemudian, bagaimana dengan pekerja yang diputus kontraknya, jadi artinya dia sudah ikut BPJS TK atau Jamsostek baru 1 tahun dia diputus kontraknya, nah dia masih bisa mendapatkan haknya atau tidak, nah ini kita perlu menginformasikan pada masyarakat, lalu kemudian juga mohon ijin bagaimana Bapak punya rencana untuk menebar Rp.420 miliar bagi 250.000 mahasiswa, benar Pak ya kalau tidak salah saya ada informasi mengenai itu? Jadi ada beasiswa pendidikan untuk 250.000 mahasiswa, ini untuk S1 atau untuk D3? ini saya meng-update dari berita-berita saja Pak. Lalu kemudian buat siapa mahasiswanya apakah anak-anak para pekerja atau bisa umum? Masyarakat perlu tahu, tolong nanti saya dikoreksi jika saya salah, saya hanya mengupdate berita tersebut.

Lalu kemudian juga, alangkah baiknya ini begini Pak kalau kita berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan artinya kita mengambil pendanaan asuransi dari pengusaha dan dari tenaga kerja, padahal yang di butuhkan negara ini adalah mengatasi pengangguran dengan menambah wirausaha, kelompok wirausaha, jadi bukan hanya sektor formal saja atau informal saja, jadi apakah mungkin ke depan Bapak membuat sebuah program pelatihan kelompok wirausaha termasuk nanti ada bantuan modalnya ini salah satu yang dilakukan dari Kementerian Tenaga Kerja adalah mengembalikan TKI-TKI ilegal, lalu diberikan pelatihan lalu nanti ada bantuan juga untuk modal kerja, mungkin tidak untuk mengurangi angka pengangguran, para pekerja-pekerja yang putus kontraknya atau mungkin yang outsourcing mereka dilatih secara berkelompok, dibina bekerja sama dengan Bank apa diberikan bantuan modal untuk menjadi wirausaha-wirausaha, paling tidak Bapak bisa menambah 1 juta wirausaha baru, ini satu prestasi Pak.

Dan yang terakhir adalah *food benefit* ini seperti apa, apakah sifatnya membeli sembako saja di Alfamart dan sebagainya atau mungkin ada suplay makanan-makanan bergizi sebab kalau Bapak melihat di Daerah-daerah industri Mba Rieke juga tahu itu banyak rumah kos-kosan pekerja-pekerja industri banyak yang perempuan, rata-rata makanan sehari-hari bakso, siomay, batagor, artinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas pekerja kita kalau makanan sehari-hari mereka adalah sangat minim sekali, sementara kita suplai gizi ini sangat dibutuhkan, apakah nanti Bapak punya sebuah konsep bagaimana memasukkan makanan-makanan bergizi mungkin susunanya, mungkin daging yang lebih murah, saya pikir dengan dana Rp.187 triliun tidak sulit untuk membuat kerjasama dengan supplier-supplier tersebut.

Jadi, inilah Bapak yang bisa saya sampaikan, saya pikir ke depan kita harus lebih open lagi, lebih terbuka lagi dan buat Anggota tadi Teman-teman menanyakan ada Panja kita memang sudah membuat Panja BPJS Ketenagakerjaan, nanti mungkin siapa yang mau ikut silakan mendaftar ke saya.

Mungkin demikian Pak Elvyn terima kasih atas masukkannya.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dede yang sudah menggunakan haknya untuk bertanya sebagai Anggota,

Selanjutnya Pak Ali Taher kebetulan barusan mendaftar silakan.

## F-PAN (DR.H.M. ALI TAHER PARASONG, SH.,M.Hum):

*Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Shalom.. Shalom itu bahasa arab, dari bahasa ibrani *assalam*, keselamatan.**

Ada sebuah pepatah latin, yang menyebut istilah dengan foluntas Habetur profakto, setiap perkataan itu memiliki nilai jika ada perbuatan, saya Muhammad Ali Taher Parasong, dapil 3 Banten, kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang daerah industri, Nomor A- 495, asli Nusa Tenggara Timur pulau Solor kabupaten Fores Timur Flores. Indonesia Timur, Mimpi tak seindah realitas, foluntas habetur profakt, seringkali kita lihat di iklan-iklan saudaraku di Televisi di media massa, apalagi saya baca dalam visi anda BPJS itu berharap supaya ini mendunia, menjadi BPJS berkelas dunia terpercaya, bersahabat, unggul dalam operasional dan pelayanan.

Saya kira itu ikhtiar yang terbaik menurut visi dan misi kita, cuma implementasinya perlu harus mendapatkan perhatian yang lebih, oleh karena itu saya hanya berpikir pertanyaan-pertanyaan teknis saya belum masuk, karena saya sadar betul bahwa transisi integrasi dari Jamsostek menjadi BPJS tenaga kerja perlu waktu, perlu perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasar baru bisa membangun kinerja, baru setelah itu baru semester setelah Juli kita bisa nilai supaya ada kepastian hukum, kalau teknis-teknis barangkali dari sekarang bisa diikuti saja, tetapi bagi saya kalau belum ada peraturan pemerintah, perangkat-perangkat teknis yang mengaturnya, saya khawatir mendunia akhirnya menjadi ....**(tidak jelas)**...

Oleh karena itu, menurut saya mulailah berpikir secara filosofi kebangsaan, seringkali pemerintah kita, kita dengar pendapat lupa dengan filosofi Pancasila, seringkali ujuk-ujuk pada teknis nah ini yang kadang-kadang urut berpikir keliru, disini saya ingin supaya akan datang itu cara berpikir kita itu ada filosofi mulai dari Pancasila dulu, kebetulan saya sekretaris Fraksi PAN MPR, 4 pilar tidak tergambar disini, padahal Pancasila itu kan menjadi start fundamental ....**(tidak jelas)**.... Kaidah dasar negara, *way of life*, pemersatu bangsa, bung Karno mengatakan dia adalah filosofi ....**(tidak jelas)**... sehingga tidak bisa saya tidak mengikuti alur pikir dari awal ini langsung ujuk-ujuk undang-undang, tidak bisa begitu, ini pejabat negara Saudara dipercaya oleh Konstitusi, Konstitusi kita buat begitu rupa, begitu indahnya, begitu memakan energi yang besar, tetapi Saudara tidak menggambarkan itu. Kedua, tujuan negara pun tidak dibangun disitu, 4 tujuan negara itu memajukan kesejahteraan umum, tidak dimuat disitu, kalau saya sebagai seorang Anggota MPR tersinggung itu, bagaimana Saudara bisa menterjemahkan ini secara detail dalam program anda kalau filosofi sendiri Saudara tidak .... **(tidak jelas)**... Ini Pak siapa namanya? Wajahnya populer, namanya tidak populer. Pak Elvyn, saya kira Elvis Presley tetapi ini Pak Elvyn, Elvyn Pak ya? Elvyn Masassya wajahnya populer tetapi namanya tidak terlalu, nah oleh karena itu, memajukan kesejahteraan termasuk Pasal 27 hak-hak tenaga kerja, hak-hak konstitusional, hak-hak warga negara, jangan saja tenaga kerja itu menjadi objek tetapi sekaligus menjadi subyek di dalam pembangunan termasuk pengasuransian, jangan sampai nanti gaya enak tampil di podium tetapi rakyat menderita, saya ini mantan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta dulu juga Jamsostek, tidak seindah apa dibayangkan.

Nah oleh karena itu, niat baru di tahun baru di awal ini mudah-mudahan akan bisa terwujud ikrarkanlah ketika terintegrasi dengan Jamsostek ini ke dalam BPJS ini akan memberikan angin baru, udara baru mulailah dengan perangkat perundang-undang yang terukur, terstruktur, memiliki filosofi yang jelas. Sehingga ketika filosofi mendunia, dunia bagi siapa? Jangan sampai seperti apa namanya ini, jalan tol Jasamarga dapat ISO berapa tuh? 9000 sekian, padahal macet tidak karuan, wc saja hak-hak konsumen tidak juga terpenuhi.

Nah, oleh karena itu menurut hemat saya mulailah dengan perangkat peraturan Perundang-undang yang jelas, sehingga ketika hak-hak konsumen termasuk juga hak-hak tenaga kerja itu bisa mendapatkan hak yang sebagus-bagusnya. Yang kedua Saudara sekalian, bagaimana merumuskan dengan antara BPJS Kesehatan dengan 4 poin yang Saudara kerjakan, 4 program itu, jaminan kesehatan bagaimana korelasinya, satu sisi tenaga kerja menyiapkan jaminan kesehatan, satu sisi ada BPJS, saya ingin mendengarkan bagaimana hubungan kerjanya itu, mekanisme hubungannya sehingga tidak tumpang tindih. Niat baik kita ini supaya bisa diatur, bisa diserasikan, kok ada 4 hal yang dijamin dalam tenaga kerja tetapi kesehatan juga mengcover supaya tidak tumpang tindih sekaligus *double* anggaran.

Kemudian, saya hanya berpesan bahwa peraturan pemerintah yang akan dibuat nanti itu, betul-betul harus betul-betul kebutuhan, bukan rekayasa politik. Saya ini orang hukum, lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan itu ada 2, disebut dengan sosial engineering, yang kedua adalah sosiologi jurisprudence, sosiologi jurisprudence itu artinya undang-undang itu lahir karena kebutuhan, tapi yang kedua ini yang saya khawatirkan dia lahir karena rekayasa politik atau kemauan orang per orang, ini yang kita hindari, kita ingin mulai sekarang bangsa ini mulai berpikir jujur, amanah karena itu ada Partai Amanat Nasional ya Pak saya dari PAN, oleh karena itu berpikirlah secara oh ini lahir karena kebutuhan.

Yang ketiga, saudaraku sekalian. Saya kira ketika kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah yang terkait dengan Jamsostek atau dengan BPJS Ketenagakerjaan, jangan didampingi eselon 3 atau eselon 2, eselon satu, eselon satu, beberapa kali kita ke daerah didampingi oleh eselon 3, tetapi bukan Saudara tempat lain mumpung belum diomelin oleh Anggota DPR RI mulailah dengan niat yang baik itu, saya kira yang keempat, tadi sudah ditanyakan, saya memperkuat saja bahwa *outsourcing* itu bagi tenaga kerja yang lepas perjanjian tidak sesuai dengan perjanjiani akhir masa kerjanya itu bagaimana, supaya bisa dicover, termasuk saya dulu mendapatkan juga Jamsostek itu 15 juta 700 sekian, keluar dari Wakil Direktur Rumah Sakit dapatnya 17 juta, 20 tahun, dapat 17 juta tetapi alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni matillah, walahaula wallalillah, Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum.*

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Karena jam sebentar lagi menunjukkan jam 1 sebagaimana kesepakatan kita dan masih ada satu penanya lagi, 2 penanya lagi yaitu Pak Ayub dan dari unsur

Pimpinan, saya minta persetujuan untuk kita bisa memperpanjang sampai jam 1.15 cukup ya? Baik, terima kasih.

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya, Pak Ayub dulu silakan.

**F-PD (DRS. AYUB KHAN):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX DPR RI beserta Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati Direktur BPJS Tenaga Kerja beserta rombongan jajarannya.**

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, yaitu mengenai perubahan paradigma, kami sangat mengapresiasi sekali terutama dari pasif menjadi aktif, tetapi kami belum bisa melihat hasilnya nyata yaitu kami mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk banyak inspeksi, jadi inspeksi langsung turun ke bawah, karena dengan inspeksi nanti akan banyak ditemukan temuan-temuan dan nantinya kami berharap juga dievaluasi dan juga diberikan sanksi seperti yang sudah ada sanksi yang tadi disampaikan, walaupun sebenarnya ada asas ketidakadilan disini di sanksi yaitu di PP Nomor 86 Tahun 2003 terkait pemberi kerja sanksinya hanya sekedar pencabutan administratif tadi sanksi .... **(tidak jelas)**... Dan juga di Pasal 55 Undang-Undang BPJS, sanksinya adalah untuk ancaman 8 tahun dan denda Rp.1 miliar ini kami juga paham BPJS selaku operator nanti kami melalui Dewan jaminan sosial nasional kita mengimbau untuk sanksi ini diperbaiki, dan kami juga mohon lewat Pimpinan, sanksi nantinya ditambahkan pula terkait manipulasi data gaji, jadi manipulasi data gaji ini sangat banyak sekali terjadi makanya nanti ke depan harus ditambahkan terkait masalah sanksi ini.

Mungkin itu dari saya *wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Walaikumsalam.*

Selanjutnya kepada Pak Syamsul Bachri silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI/FPG[H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc**

Ya terima ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golkar, sebagai orang awam di bidang ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Direksi yang pertama, soal perubahan budaya kalau pertama sebagai BUMN itu orientasinya adalah profit oriented atau mencari laba, setelah menjadi BHP, dia akan berubah menjadi nirlaba, pertanyaan saya adalah melihat dari laporan yang ada di bidang investasi saya belum melihat perubahannya apa, dan bagaimana perlakuan terhadap dana yang ada ketika sebagai BUMN dan ketika sebagai BHP, ada investasi dimana-mana, ada penyertaan modal di mana-mana, tentu mendapatkan laba saya kira ini adalah sesuatu yang wajar.

Yang kedua, tanda tanya Pak Direksi adalah soal pelayanan kesehatan, kita memiliki BPJS Kesehatan tapi BPJS TK juga memberikan pelayanan kesehatan, barangkali ini sampai bulan Juli atau sampai kapan? Dan bagaimana intersection antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja terhadap anggotanya. Kemudian yang terakhir, soal CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh BPJS Tenaga Kerja, saya membayangkan bahwa banyak tenaga kerja kita yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai sekolah putra-putrinya, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengah sudah ditanggung oleh oleh negara, yang ingin saya minta tanggapan kepada direksi bagaimana kalau perusahaan ini juga mencoba untuk memberikan beasiswa kepada putra putri terbaik, dari tenaga kerja, mereka cerdas, mereka memiliki prestasi akademik yang baik tapi tidak mampu apa tidak berpikir BPJS Tenaga Kerja ini untuk bertindak sebagai Bapak asuh dari mereka, sehingga tenaga kerja kita ini tidak seterusnya menjadi tenaga kerja yang loss skill atau segala macam tapi pada saatnya nanti putra putrinya ini akan menjadi akan menjadi direktur utama Perusahaan-perusahaan karena mereka memang cerdas, mereka pintar tapi orang tuanya tidak mampu.

Ketika saya di Komisi X DPR RI banyak sekali saya temukan anak-anak kita seperti ini, Bapaknya buruh kasar, mereka cerdas saya tanya disekolahnya mereka selalu dapat A tapi mereka putus sekolah, karena tidak ada biaya, meskipun ada bidik misi dan seterusnya tapi kelihatannya tidak bisa menjangkau cukup luas hal-hal semacam ini, jadi saya kira itu beberapa pertanyaan singkat dari saya, yang pertama soal perubahan perlakuan, BPJS ketika profit oriented dan ketika nirlaba.

Terima kasih Ibu Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Walaikumsalam.

Masih ada tambahan dari Anggota yaitu Pak Zulfikar, silakan.

#### **F-PD (DRS. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Direktur BPJS dan beserta jajarannya.**

Saya nambah sedikit saja Pak, sebelum ini visi misinya Pak Jokowi juga terhadap buruh nelayan, begitu banyaknya nelayan di seluruh Indonesia dan begitu juga Menteri Kelautan Ibu Susi memberantas kapal-kapal yang mencuri ikan di laut kita, adakah berpikir, terpikirkan oleh Bapak untuk memberikan semacam suatu kreditur kelompok kepada nelayan kita untuk membeli kapal, kalau kapal yang kira-kira 10 ton dan 15 ton itu lebih kurang Rp.200 miliar, harganya karena saya juga punya kapal itu Pak, nah oleh sebab itu disini perumahan sudah bagus, transportasi juga masalah pendidikan dan juga kesehatan, nah kenapa ini tidak ada atau belum teringat untuk memberi bantuan kepada tenaga kerja kita itu khusus pelaut ini, contoh saja Pak Rukhmin itu anak anak pelaut bekerja itu Pak, bisa menjadi Professor begitu ininya hebatnya, artinya kontribusi dari pelaut ini sangat besar untuk negara kita, saya rasa itu saja tambahan dari saya.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih. Semua Anggota masih ada ya akan menyampaikan pendalaman? cukup? Kalau cukup...

**ANGGOTA KOMISI IX:**

Boleh sedikit Pimpinan? tambahkan sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**ANGGOTA KOMISI IX:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

**Yang saya hormati para undangan dari Dirut BPJS Ketenagakerjaan.**

Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari banyak sekali disampaikan oleh Teman-teman yang lain yaitu Masukan atau kritik saya terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah kaitannya yang paling urgent adalah sosialisasi, sosialisasi saya lihat kalau di Dapil saya yaitu Garut, mohon maaf karena saya *incumbent* dulunya bekerja sama juga dengan ketenagakerjaan sudah saya laporkan beberapa perusahaan yang sampai saat ini belum optimal dalam kepesertaannya, jadi mohon Bapak berikan fokus atau perhatian kepada Perusahaan-perusahaan di daerah terutama itu Dapil saya Garut dan Tasik, kemudian saya lihat beberapa kali ada

strategi khusus untuk sosialisasi ini yaitu melakukan sosialisasi di jalanan, pada saat ada car free day disana ada *counter* kecil begitu ya, maksudnya mungkin daripada mereka tidak bekerja sama sekali bukan counter ya pajang banner begitu dan kemudian mereka pakai toa dan yang mendengar sedikit, sementara saya pikir kalau sosialisasinya seperti itu siapa yang akan tersentuh kalau begitu ya. Saya harapkan sosialisasinya itu lebih baik dan lebih mengena lagi ke Perusahaan-perusahaan, kepesertaannya meningkat. Harapkan lagi dari BPJS Kesehatan ada satu program yang cukup bagus dulu itu yang pernah saya rasakan juga, dari kemitraan kita di Komisi IX DPR RI dahulu yaitu program memberikan jaminan kepada pedagang kecil ya kalau tidak salah hanya berlaku 3 bulan kalau tidak salah kartu asuransinya itu. Benar Pak ya ada program itu, nah itu saya belum mendengar lagi program itu, kami harapkan kerja sama yang baik kembali untuk program ini sangat dibutuhkan, kebetulan di daerah saya kemarin ada beberapa yang mendapatkan itu dan mengklaim itu bisa diklaim dengan baik artinya program ini bisa dirasakan oleh masyarakat, kami harapkan kerja sama yang baik di antara kita lebih dioptimalkan sehingga kita bisa membantu memaksimalkan target dari BPJS Ketenagakerjaan.

Terima kasih. Mungkin itu Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Sudah ya habis?

**Bapak dan Ibu yang saya hormati,  
Saudara Direktur Ketenagakerjaan, para Anggota.**

Kita tadi menyepakati sampai jam 1.15, kita akan break agar juga memberi kesempatan kepada Saudara Direktur dan seluruh jajaran untuk mempersiapkan tanggapan terhadap pendalaman yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisi IX DPR RI, karena kalau sekarang kita berikan kesempatan waktunya amat sangat terbatas, nanti terputus, lebih baik kita sepakati kita masuk jam 2? Jam 2 ya?

#### **ANGGOTA KOMISI IX:**

Jam 2 cocok habis shalat, habis makan. terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya bisa shalat, makan kemudian kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Saudara Direktur BPJS untuk menyampaikan tanggapan terhadap beberapa pendalaman yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisi IX DPR RI, setuju ya? kita masuk lagi jam 2.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DISKORS)**

**KETUA KOMISI IX DPR RI/F-PD [DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.Si**

Buat Pak Dirut dan jajarannya di ruang sebelah disiapkan makan siang Pak.

**RAPAT DITUTUP PUKUL . 15:59:08 WIB**

**Jakarta, 26 Januari 2015  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ttd,**

**MUH. YUS IQBAL, SE  
NIP. 196707171993031006**